

**PENGARUH AKSESIBILITAS DAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)

Oleh

**FARADILLA
E1120022**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH AKSESIBILITAS DAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

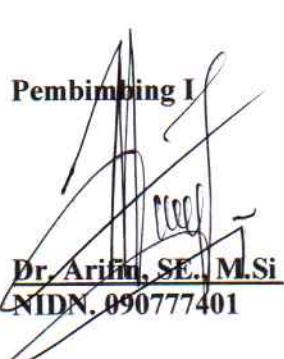
(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)

Oleh
FARADILLA
E1120022

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal

Gorontalo, 20 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. Arifin, SE, M.Si
NIDN. 090777401

Pembimbing II

Sheila Budiawan, SE.,M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH AKSESIBILITAS DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)

Oleh

FARADILLA
E1120022

Diperiksa Oleh Dewan Pengaji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo.....2024

1. Dr. Marten Puyo, SE., M.Ak
(Ketua penguji)
 2. Reyther Biki, SE., M.Si
(Anggota penguji)
 3. Parmin Ishak, S. Akun., M.Si
(Anggota Penguinji)
 4. Dr. Arifin, SE., M.Si
(Pembimbing utama)
 5. Shella Budiawan, SE., M.Ak
(Pembimbing pendamping)

~~Seume~~
~~Wolff~~
~~Stolle~~

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Akuntansi



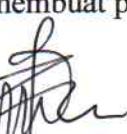
Sheila Budiawan, SE., M.Ak
NIDN : 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan terdapat pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 Maret 2024

 membuat pernyataan,



FARADILLA
NIM. E1120022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan terdapat pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,

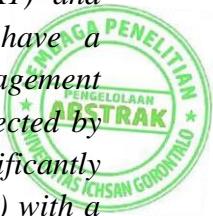
FARADILLA
NIM. E1120022

ABSTRACT

FARADILLA. E1120022. THE EFFECT OF ACCESSIBILITY AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY AT THE FINANCE AGENCY OF GORONTALO MUNICIPALITY

This study aims to find and analyze to what extent Accessibility (X1) and Accounting Information Systems (X2) simultaneously and partially affect Regional Financial Management Accountability (Y) at the Finance Agency of Gorontalo Municipality. The research type in this study is quantitative, using the questionnaire in data collection. The population covers all apparatus at the Finance Agency of Gorontalo Municipality with a sampling technique based on proportionate stratified random sampling using the Slovin formula through multiple regression analysis with two predictors. The results of this study indicate that Accessibility (X1) and Accounting Information Systems (X2) simultaneously have a positive and significant effect on Regional Financial Management Accountability (Y) by 69.9%. The remaining 30.1% is affected by other variables outside the model. Accessibility (X1) significantly affects Regional Financial Management Accountability (Y) with a positive coefficient direction of 96.4%. Accounting Information System (X2) significantly affects Regional Financial Management Accountability (Y) with a positive coefficient direction of 63.5%.

Keywords: accessibility, accounting information system, regional financial management accountability



ABSTRAK

FARADILLA. E1120022. PENGARUH AKSESIBILITAS DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLOAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Aksesibilitas (X1) Dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan dan parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode angket dalam pengumpulan data. populasi adalah seluruh pegawai yang ada pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan teknik penarikan sampel berdasarkan *proportionate stratified random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin. Menggunakan metode analisis regresi berganda dengan dua prediktor. Hasil penelitian ini menunjukkan Aksesibilitas (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 69,9% dan sisanya 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Aksesibilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan arah koefisien positif sebesar 96,4%. Sistem Informasi Akuntansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan arah koefisien positif sebesar 63,5%.

Kata kunci: aksesibilitas, sistem informasi akuntansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahamatullahi Wabarakattuh.

Puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala karunia yang dilimpahkan-Nya, atas taufik dan Rahmat-Nya kepada penulis, Sehingga berkat kemurahan hati dan segala kemudahan yang telah diberikan oleh-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)”**.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan sehingga dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar dapat diberikan masukan, saran, serta kritik yang membangun demi perbaikan kedepannya. Penulis pun menyadari bahwa penulis tidak akan pernah mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam kesulitan dan hambatan, namun berkat ridho Allah SWT, Doa Orang tua dan Keluarga serta bantuan dari dosen pembimbing dan dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut Alhamdulilah dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE.,

M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE.,M,Ak selaku ketua jurusan Universitas Ichsan Gorontalo serta selaku pembimbing II, Bapak Dr. Arifin, SE., MSi selaku Pembimbing I, serta seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Ichsan Gorontalo dan yang teristimewa ucapan terimakasih saya sampaikan buat Kedua Orang Tua saya, Keluarga, dan teman-teman yang selalu ada dalam memberikan doa, dukungan serta semangat kepada saya, serta keluarga Tante yang membiayai kuliah saya dengan penuh keikhlasan.

Akhir kata, penulis berharap semoga doa, bantuan, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. terimakasih.

Gorontalo, 20 Maret 2024

FARADILLA
NIM. E1120022

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO :

" Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. tetap berjuang ya!"

" Saya tidak punya waktu untuk sakit hati, saya tidak punya energi untuk dendam, saya bersyukur tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak, jangan cepat sakit hati, jangan mudah tersinggung,jangan dendam"

(Prabowo Subianto)

"Bukan Kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit"

(Joko Widodo)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan yang kau impikan, mungkin tidak akan berjalan dengan lancar, tetapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan kau ceritakan"

PERSEMBAHAN :

Sujud syukur aku persembahkan kepada ALLAH S.W.T berkat rahmatnya detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya sehingga saat ini aku dapat mempersembahkan skripsi ku kepada orang-orang terkasih dan tersayang

Kedua orang tua ku tercinta Bapak (Nasir) dan Ibu ku (Hartati) yang tak pernah lelah membesarakan ku dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi, doa dan pengorbanan dalam hidup ini.

Kakak ku (Annisa Azzahra) dan Adik-adik ku (Asika Zahra, Muh. Ikhsan dan Zakiyah Nuraini) serta (Sulaiman) yang selalu memberikan dukungan semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa serta kasih sayangnya.

dan

"Almamaterku tercinta (Universitas Ichsan Gorontalo)"

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Maksud Penelitian.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat teoritis	11
1.4.2 Manfaat praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	12
2.1.2 Aksesibilitas.....	14
2.1.3 Pengaruh Aksesibilitas Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	22
2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi.....	24
2.1.4.1 Sistem	24
2.1.4.2 Informasi	26
2.1.4.3 Akuntansi.....	27
2.1.4.4 Sistem Informasi Akuntansi	29
2.1.5 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	42

2.1.6	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	42
2.1.6.1	Akuntabilitas	42
2.1.6.2	Pengelolaan Keuangan Daerah	46
2.1.6.3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	48
2.2	Penelitian Terdahulu.....	55
2.3	Kerangka Pikir.....	56
2.4	Hipotesis.....	59
BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	60
3.1	Objek Penelitian	60
3.2	Metode Penelitian.....	60
3.2.1	Metode Yang Digunakan	60
3.2.2	Operasionalisasi Variabel	61
3.2.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	63
3.2.3.1	Populasi Penelitian	63
3.2.3.2	Sampel Penelitian	64
3.2.4	Jenis dan Sumber Data serta Metode Pengumpulan Data	66
3.2.4.1	Jenis Data	66
3.2.4.2	Sumber Data penelitian	66
3.2.4.3	Metode Pengumpulan Data	66
3.2.5	Analisis Instrumen Penelitian	67
3.2.5.1	Validitas.....	67
3.2.5.1.1	Rumus Uji Validitas.....	68
3.2.5.1.2	Pengujian Validitas	69
3.2.5.2	Reliabilitas.....	70
3.2.6	Metode Analisis Data.....	72
3.2.6.1	Uji Asumsi Klasik	73
3.2.7	Pengujian Hipotesis	75
3.2.7.1	Uji F (Uji Simultan)	75
3.2.7.2	Uji t (Uji Parsial)	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
4.1.1	Sejarah Singkat Badan Keuangan Kota Gorontalo	76
4.1.2	Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo.....	77
4.1.3	Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kota Gorontalo.....	79

4.1.4	Visi dan Misi Badan Keuangan Kota Gorontalo	88
4.1.5	Karakteristik Responden.....	89
4.1.5.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
4.1.5.2	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	89
4.2	Hasil Penelitian.....	90
4.2.1	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	90
4.2.1.1	Aksesibilitas (X1).....	91
4.2.1.2	Sistem Informasi Akuntansi	92
4.2.1.3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	94
4.2.2	Uji Validitas dan Reabilitas	95
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Aksesibilitas (X1).....	95
4.2.2.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Informasi Akuntansi (X2)	97
4.2.2.3	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	98
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	100
4.2.4	Uji Hipotesis	103
4.2.5	Persamaan Regresi Berganda.....	107
4.3	Pembahasan	109
4.3.1	Aksesibilitas dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.. ..	109
4.3.2	Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	110
4.3.3	Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	112
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	120
CURRICULUM VITAE	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pikir.....	57
Gambar 3. 1 Struktur Regresi Berganda	73
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo	77
Gambar 4. 2 Histogram uji normalitas data	100
Gambar 4. 3 Hasil uji normal probability plot residual	101
Gambar 4. 4 Hasil uji heteroskedastisitas	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	55
Tabel 3. 1 Operasional Variabel X.....	62
Tabel 3. 2 Operasional Variabel Y	62
Tabel 3. 3 Bobot nilai variabel	63
Tabel 3. 4 Populasi Penelitian.....	63
Tabel 3. 5 Sampel Penelitian.....	65
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	89
Tabel 4. 3 Rentang Skala	90
Tabel 4. 4 Distribusi Jawaban Responden (X1).....	91
Tabel 4. 5 Distribusi Jawaban Responden (X2).....	92
Tabel 4. 6 Distribusi Jawaban Responden (Y).....	94
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Aksesibilitas (X1)	96
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas X1	97
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Informasi Akuntansi (X2)	97
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas X2	98
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).....	99
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas Y	99
Tabel 4. 13 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	101
Tabel 4. 14 Coefficients	102
Tabel 4. 15 Hasil Simpulan Tabel Coefficients	102
Tabel 4. 16 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	104
Tabel 4. 17 Hasil Uji Pengujian Ketepatan Model R2.....	105
Tabel 4. 18 Hasil uji parsial (Uji T)	106
Tabel 4. 19 Uji T	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa reformasi yang terjadi belakangan ini menyebabkan adanya perubahan struktur pemerintahan. salah satu perubahan tersebut yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mini, 2021). konsep otonomi daerah meningkatkan tuntutan sosial terhadap pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan yang baik. dengan meningkatnya tuntutan tersebut, memaksa pemerintah untuk dapat memenuhi akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya berdasarkan perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat bagi pemerintah daerah untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang memadai, efektif dan efisien, dan perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem akuntabilitas, hukum, dan penerangan yang memadai. Salah satu asas umum pemerintahan adalah asas akuntabilitas, yang dinyatakan dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme. Asas akuntabilitas merupakan prinsip bahwa seluruh hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan harus diserahkan kepada masyarakat setempat (LKIP Kota Gorontalo Tahun 2021).

Akuntabilitas merupakan ungkapan tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya suatu program undang-undang nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tinjauan kinerja atas laporan kinerja instansi untuk bertanggung jawab atas pengembangan fungsi, tugas dan kegiatannya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (LKIP Kota Gorontalo Tahun 2021).

Akuntabilitas juga wujud dari pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan yang disusun dalam rangka mengukur tingkatan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan sasaran kebijakan, dan program. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari adanya reformasi sektor publik yang menuntut/mengharuskan lembaga-lembaga sector publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban yang perlu dibuatkan laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2018).

Seperti yang diketahui, jika proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefenisikan laporan keuangan PSAP 01 adalah sebagai laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Ikhsan & Edisah, 2019 dalam Subhan 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara tepat waktu dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan

layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap.

Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut perlu diaudit terlebih dahulu oleh BPK sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Setelah laporan keuangan diaudit, BPK memberikan opini yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan, yaitu Opini WTP, Opini WDP, Opini Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.

Unit pelaksana Pemerintah Kota Gorontalo yang memiliki tugas pokok dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu Badan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan. serta berfungsi untuk merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan lingkup hidup tugasnya.

Dilihat dalam siaran pers oleh BPK mengatakan bahwa Kota Gorontalo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini WTP ini

merupakan pencapaian kualitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah bagi masing-masing daerah yang menunjukkan perhatian pemerintah daerah serta sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik. Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan salah satunya pada Badan Keuangan yaitu terjadinya kekeliruan dalam dokumen penetapan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai belum sesuai dengan ketentuan salah satunya yaitu terjadinya kekeliruan dalam dokumen penetapan serta kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 2,91%, yang menunjukkan kontribusinya sangat kurang meski tetap bisa mempengaruhi PADnya (Afni Nooraini et.al 2022).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya keuangan yang dipercayakan kepada mereka. *Human error* dapat terjadi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, seperti dalam penyusunan laporan keuangan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan. Salah satu dampak *human error* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketidaktransparan dan ketidakakuntabelan dalam penggunaan sumber daya keuangan. Jika terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya informasi yang disajikan mungkin tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengurangi transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Selain itu, kesalahan manusia juga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh hasil pelaksanaan dijuwudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi secara cepat akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (Annisaningrum, 2010).

Kegagalan laporan keuangan dalam memenuhi akuntabilitas dapat dilihat dari informasi yang tertuang dalam laporan tahunan kurang relevan sehingga *stakeholder* tidak dapat secara langsung memperoleh semua informasi laporan keuangan tersebut. Adanya informasi yang kurang lengkap tersebut dapat menyebabkan masyarakat menuntut adanya aksesibilitas untuk memudahkan para pengguna mendapatkan informasi laporan keuangan (Wulan Artini dan Deddy, 2020).

Aksesibilitas dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efektif merupakan faktor kunci dalam menmenej keuangan. Kemudahan akses informasi dapat berdampak pada tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, karena akses informasi keuangan yang lebih mudah dan cepat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan. Di sisi lain, sistem

informasi akuntansi yang efektif dapat berkontribusi pada manajemen keuangan yang lebih baik, termasuk pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan.

Pemerintah Kota Gorontalo memanfaatkan era kemajuan teknologi untuk membuat layanan semakin lebih mudah, cepat, praktis dan transparan. hampir semua pelayanan di instansi pengelola keuangan daerah tersebut telah menggunakan sistem digital. Ada beberapa aplikasi yang telah diterapkan dikota gorontalo, yakni SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan FMIS (*Financial Management Information System*). Aplikasi ini merupakan kolaborasi dengan berbagi pakai dari Kemendagri dan BPKP dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kedua Aplikasi tersebut sangat membantu perangkat daerah agar tertib mengelola keuangan secara akuntabel (berita.gorontalokota.go.id)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 yang dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah (Pradeva dan Jovan, 2023). Seiring dengan perkembangan, terdapat perubahan regulasi yang sangat mendasar yang mempengaruhi aplikasi SIMDA, yaitu PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya perubahan regulasi tersebut SIMDA dituntut untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Oleh karena itu, Tim Satgas SIMDA BPKP Pusat mengembangkan aplikasi SIMDA NG atau FMIS. Aplikasi yang berbasis web yang memungkinkan untuk berbagi pakai infrastruktur dan berbagi data, dan dirilis mulai tahun 2021 Pengembangan SIMDA dengan FMIS yang dilengkapi dengan pengendalian dalam sistem, dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku (bpkp.go.id)

Badan Keuangan Kota Gorontalo mengatakan bahwa penggunaan SIPD belum dinilai optimal sampai ke pelaporan keuangan sehingga membutuhkan FMIS yang dibuat berdasarkan implementasi dari pedoman pengelolaan keuangan daerah yang dibuat langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Aplikasi SIPD dan FMIS dapat membantu meningkatkan transparansi dan keakuntabelan pengelolaan keuangan daerah dalam sistem informasi akuntansi. Dengan adanya aplikasi tersebut informasi keuangan dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum serta penggunaan aplikasi tersebut dapat mengurangi *Human error* dalam proses pengelolaan keuangan daerah karena pada aplikasi ini dapat melakukan perhitungan otomatis, mengurangi risiko kesalahan perhitungan atau pencatatan yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Sumiyati (2015) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A.dahri dan Jumawan (2021), Zeny,Yunika,Hafifah (2020) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Wulan, I Putu Deddy (2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul **“Pengaruh Aksesibilitas Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Apakah aksesibilitas (X1) dan sistem informasi akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo?
2. Apakah aksesibilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo?

3. Apakah sistem informasi akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji pengaruh dari aksesibilitas dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aksesibilitas (X1) dan sistem informasi akuntansi (X2) secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aksesibilitas (X1) secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi (X2) secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia terutama dalam hal Pengaruh aksesibilitas dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat praktis

1) Bagi Badan Keuangan kota Gorontalo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak tertentu dalam pengambilan kebijakan

2) Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diambil dibangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada objek yang diteliti serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan atau kantor, sehingga dapat menambah pengetahuan sehubungan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan alat/fungsi di mana informasi yang disajikan memiliki kualitas yang sebenarnya, nyata, objektif, dan terpercaya. Ini akan menimbulkan hubungan yang harmonis di antara para stakeholders dan informasi akuntansi menjadi lebih terpercaya yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk pembuatan keputusan terutama dalam hal fungsi pengelolaan pemerintah (*steward*), penilaian kinerja, dan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah (Rofelawaty dalam penelitian Zeny, 2020).

Stewardship theory merupakan bagian dari teori *agency*. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori *stewardship* didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori *stewardship* memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya (Clarke 2004 dalam Zoelisty 2014). Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan *utilitas steward dan principal*.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik karena pada dasarnya manusia merupakan subjek utama yang berperan sebagai penggerak ekonomi. organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menjadi penghubung antara *steward* dengan *principals*.

Aksesibilitas yang baik terhadap laporan keuangan terjadi jika *Stewardship* mendorong pengelola untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori Stewardship dapat berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas laporan keuangan. dalam Sistem Informasi berperan penting dalam mendukung fungsi stewardship. SIA membantu pengelola dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk melindungi dan memaksimalkan pelayanan sehingga pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi keuangan.

Teori *Stewardship* berperan dalam mendorong pengelola keuangan daerah untuk bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana publik untuk dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang mengutamakan kepentingan prinsipal (pemilik dana publik) daripada kepentingan pribadi. Selain itu, aksesibilitas laporan keuangan juga berperan penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas yang baik terhadap laporan keuangan memungkinkan masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk memahami dengan jelas penggunaan dana publik

dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, aksesibilitas laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.1.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas (accessibility) menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan mengacu pada kemudahan untuk memperoleh informasi tentang suatu laporan keuangan (Mulyana, 2006) Sedangkan menurut (Apriliani, 2015) aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah (Mustofa, 2012).

Aksesibilitas dari perspektif spasial adalah status atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lain atau kenyamanan orang atau kendaraan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan keamanan, kenyamanan dan kecepatan yang wajar. ketersediaan laporan keuangan merupakan kenyamanan bagi seseorang mendapatkan informasi tentang laporan tersebut masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang berhak mengelola keuangan publik untuk dapat mengakses informasi keuangan pemerintah(Wahyuni et al., 2014).

Menurut Mulyana (2006) aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas dapat diartikan sebagai

kemudahan untuk dapat mengakses setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan tidak hanya kepada lembaga legislatif atau badan pengawasan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat agar dapat mengakses dan mengetahui setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Saat aksesibilitas laporan keuangan daerah dipenuhi, maka dapat meningkatkan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Putri, 2021).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung dan aksesibel pada para pengguna potensial (jones et all,1985). Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampai-kannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang

memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Menurut PP No. 24 tahun 2005, laporan keuangan merupakan alat tanggung jawab untuk tindakan pemerintah. Laporan keuangan telah diatur informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi dibuat oleh entitas pelapor untuk satu periode pelaporan. Presentasi laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk kebutuhan diperlukan transparansi mendukung adanya akuntabilitas berupa transparansi pemerintah pada kegiatan pengelolaan keuangan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang relevan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan keuangan. laporan keuangan yang telah disusun dapat mengungkapkan pelaporan keuangan untuk menyediakan transparansi laporan keuangan, karena masyarakat berharap pemerintah daerah bisa menyediakan akses yang mudah untuk mengakses laporan keuangan (Fahmi, 2021).

Pemerintah daerah harus menindaklanjuti kriteria yang dianggap dapat diandalkan dan untuk melaporkan kinerja secara andal dalam publikasi laporan keuangan. berikut merupakan kriteria aksesibilitas laporan keuangan (Fauziyah dan Handyani, 2017 dalam Zeny et al.,2020) yaitu: 1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan diproduksi oleh pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa; 2) Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi keuangan daerah; dan 3) Dapat diakses (mudah tersedia), artinya masyarakat mempunyai akses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

1. Keterbukaan

Keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2010:30) yang artinya warga masyarakat mempunyai persamaan hak dan akses terhadap proses anggaran yang berkaitan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak.

Salah satu pernyataan nilai dan prinsip tata kelola yang baik adalah transparansi dan sistem manajemen yang harus mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas. dengan tujuan utama yaitu terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, bertanggung jawab, terpercaya, bersih, peka dan tanggap berdasarkan etika,

semangat pelayanan, tanggung jawab publik serta integritas pelayanan dalam memenuhi misi negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Keterbukaan atau transparansi penting bagi pemerintah untuk memenuhi amanat rakyat. Mengingat pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, maka pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatannya. Transparansi membuat kebohongan lebih sulit disembunyikan. Dengan demikian, transparansi menjadi alat penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari korupsi.

Keterbukaan menjadi aspek penting dalam memastikan akuntabilitas karena keterbukaan memungkinkan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Dengan adanya keterbukaan, informasi mengenai berbagai kegiatan dan pengelolaan sumber daya menjadi lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang dapat mendorong terciptanya praktek-praktek yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu, keterbukaan juga dapat meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, karena tindakan-tindakan yang tidak akuntabel akan lebih mudah terungkap. Dengan demikian, keterbukaan merupakan salah satu fondasi utama dalam memastikan terwujudnya akuntabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan keuangan

Integrasi keterbukaan/transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung

pertumbuhan, kepercayaan, dan keinginan. Masyarakat, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat dengan mudah memahami dan menilai kinerja keuangan serta kontribusi organisasi atau entitas terhadap masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

2. Kemudahan

Wijaya, Anim dan Sutrisna (2016) mengatakan aksesibilitas merupakan suatu upaya pemerintah memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif bergantung pada ketersediaan laporan keuangan publik agar mereka dapat membaca dan memahaminya. Jadi informasi dalam laporan keuangan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan tanggung jawab, yang dibutuhkan oleh pemerintah kota memaksimalkan ketersediaan laporan keuangan, tidak hanya disampaikan kepada DPRD, namun justru memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami dan memahaminya laporan keuangan (Fauziyah, 2017).

Kemudahan pelaporan informasi keuangan pemerintah dapat menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat. Beberapa langkah dan praktik yang dapat diterapkan pemerintah untuk memastikan kemudahan akses dan transparansi terhadap informasi keuangan meliputi:

- 1) Penerapan sistem informasi keuangan, Pemerintah dapat menerapkan sistem informasi keuangan yang canggih untuk mengelola dan melaporkan

data keuangan secara efektif. Sistem tersebut harus memberikan akses yang mudah kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

- 2) Membuat laporan keuangan yang jelas dan rinci, Pemerintah harus menyiapkan laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang lengkap dan rinci dalam laporan keuangan dapat membantu pemangku kepentingan memahami biaya pengeluaran serta penerimaan dana.
- 3) Publikasi online, Informasi keuangan harus dapat diakses dengan aman dan mudah oleh masyarakat melalui portal atau situs web resmi pemerintah. Informasi keuangan dapat disajikan dalam format yang dapat diunduh dan mudah dipahami.
- 4) Keterlibatan masyarakat, Pemerintah dapat mengadakan forum atau pertemuan dengan publik untuk menjelaskan tentang laporan keuangan serta keterlibatan masyarakat dalam penganggaran juga dapat meningkatkan transparansi.
- 5) Auditor independen, Melibatkan auditor independen untuk menelaah dan merevisi laporan keuangan dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan
- 6) Pendidikan dan Pelatihan, Memberikan pelatihan untuk menggunakan sistem informasi keuangan secara efektif serta mendidik tentang pentingnya informasi keuangan dan cara membacanya juga dapat membantu dalam menyajikan laporan yang baik.

3. Dapat diakses (Accessible)

Ketersediaan informasi memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk membuat informasi keuangan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dengan akses yang lebih baik, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat, organisasi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami, meninjau, dan memantau perkembangan terkait keuangan publik. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan merupakan prinsip penting dalam praktik tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Berikut adalah beberapa cara untuk memastikan laporan keuangan dapat diakses dengan mudah:

- 1) Keberanian untuk mempublikasikan, Laporan keuangan harus dipublikasikan secara berani dengan mengunggah ke situs web resmi pemerintah atau platform khusus transparansi keuangan.
- 2) Format yang mudah dimengerti, Penyajian laporan keuangan kepada masyarakat dalam format yang mudah dipahami. Penggunaan bagan, tabel dan ringkasan juga dapat membantu menyampaikan informasi.
- 3) Portal Transparansi Keuangan, Membuat portal transparansi keuangan yang menampilkan laporan keuangan secara detail dan sekilas agar mudah diakses oleh masyarakat.
- 4) Pencarian dan navigasi yang mudah, Website atau portal pelaporan keuangan memiliki fungsi pencarian dan navigasi yang mudah digunakan sehingga pemangku kepentingan dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan.

- 5) Pengumuman dan pembaruan rutin, Memberikan pengumuman atau pemutakhiran secara berkala melalui berbagai saluran komunikasi untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan mengenai pemutakhiran atau perubahan terkait laporan keuangan.
- 6) Format yang mudah diunduh, Menawarkan kemampuan untuk mengunduh laporan keuangan dalam format yang umum digunakan (seperti PDF) sehingga pemangku kepentingan dapat menyimpan atau mencetaknya sesuai kebutuhan mereka.
- 7) Transparansi pengiriman data, Memberikan informasi keuangan secara jelas dan transparan, termasuk catatan tambahan untuk memperjelas aspek-aspek tertentu.
- 8) Auditor Independen, Melibatkan auditor independen dalam proses audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kejelasan informasi.

Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka dapat diakses oleh publik secara efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2.1.3 Pengaruh Aksesibilitas Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas yang efektif berrgantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban dan laporan temuan yang mudah untuk dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses sini diberikan oleh media seperti surat kabar,

majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para stakeholders yang artinya pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak dapat memberikan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. tetapi jika informasi dalam laporan keuangan dapat diketahui dengan mudah dan cepat publik, pemerintah juga harus meningkatkan ketersediaan laporan keuangan dengan memberikan akses gratis kepada masyarakat melalui media, maka pemerintah secara langsung telah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah mampu memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, badan keuangan pemerintah kota Gorontalo harus mampu meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke kepala daerah tetapi juga mampu memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui dan memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah & Nahar, 2012).

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.4.1 Sistem

Romney (2015) menyatakan bahwa sistem merupakan sekumpulan dua atau beberapa komponen yang bekerja sama dan saling berhubungan untuk tujuan yang spesifik. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa sistem adalah jaringan prosedur yang saling berhubungan dan bersatu untuk melakukan sebuah tindakan dalam mencapai tujuan tertentu (kamus Teknologi dan Informasi, 2009). Berdasarkan kedua pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Suatu sistem dapat nyatakan sebagai subsistem, komponen atau suatu kumpulan elemen yang bekerja sama untuk tujuan yang sama yaitu menghasilkan output tertentu. Contohnya adalah sistem komputer, Biasanya komputer berfungsi jika ada beberapa komponen berikut:

- 1) *Processor* (sebagai pemroses data).
- 2) *Memory* (sebagai tempat penyimpanan data sementara).
- 3) *Monitor* (sebagai sarana menampilkan data yang diproses).
- 4) *Keyboard* (sebagai alat input/komunikasi data manusia dan komputer).

Setiap komponen memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Dalam jelasnya, keduanya saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ada ketergantungan di antara komponen-komponen tersebut, membentuk sebuah sistem yang kompleks. komponen-komponen tersebut harus

tetap utuh atau tidak mengalami kerusakan agar tujuan dari sistem tersebut dapat terwujud.

Fungsi sistem dalam sebuah organisasi pada pemerintahan yaitu:

- 1) Pencatatan dan pelaporan keuangan, Sistem Akuntansi dapat membantu sebuah organisasi dalam mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Pengelolaan anggaran, Sistem membantu dalam hal perencanaan, alokasi, dan pengawasan anggaran pemerintah daerah yang mencakup pembuatan anggaran, pelacakan pengeluaran, dan evaluasi kinerja terhadap anggaran.
- 3) Manajemen sumber daya manusia, sistem dapat digunakan dalam pencatatan data karyawan, penggajian, manajemen kinerja, dan pelaporan terkait SDM.
- 4) Pengelolaan aset, sistem digunakan untuk melakukan pencatatan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset daerah, termasuk inventarisasi, pemantauan perawatan, dan pelaporan.

Beberapa fungsi tersebut dapat mencerminkan kompleksitas tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. karena pada dasarnya sistem yang baik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

2.1.4.2 Informasi

Jogiyanto (1997) menyatakan bahwa informasi merupakan data yang signifikan yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna dalam menggambarkan suatu kejadian untuk dasar pengambilan keputusan. Informasi pada dasarnya seperti halnya pabrik dan peralatan, artinya organisasi menggantungkan diri pada sistem informasi untuk dapat mempertahankan kemampuan dalam berkompetisi.

Data adalah fakta yang dimasukkan kedalam, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi akuntansi. sedangkan informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. artinya data merupakan *input*, sedangkan informasi merupakan *output* bagi sebuah sistem informasi.

Menurut para ahli, informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut:

- 1) Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk memprediksi atau menegaskan ekspektasi.
- 2) Dapat dipercaya, informasi harus bebas dari kesalahan serta harus jelas dalam mencerminkan maksud nya atau secara akurat dapat menggambarkan aktivitas organisasi.
- 3) Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.
- 4) Tepat waktu, informasi yang dihasilkan harus disajikan secara tepat agar tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- 5) Mudah dipahami, data disajikan dalam format yang mudah dimengerti.

- 6) Dapat diuji kebenarannya, menghasilkan informasi yang sama secara independen.

Informasi dapat memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. yang berfungsi sebagai pengumpulan, analisis, dan penyajian data keuangan yang akurat dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dan keakuntabelan pengelolaan keuangan. Informasi dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah. Informasi juga dapat digunakan untuk merancang dan menyusun anggaran pemerintah daerah yang mengenai pendapatan dan belanja serta membantu dalam menetapkan alokasi anggaran untuk program-program dan kegiatan di masa mendatang.

2.1.4.3 Akuntansi

Akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. tujuan utama dari akuntansi yaitu menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pada pemerintahan biasa disebut dengan akuntansi sector publik yang merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi yang terjadi pada organisasi di pemerintahan. berikut fungsi akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah:

- 1) Fungsi dasar akuntansi yaitu mencatat setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah yang mencakup semua kegiatan finansial yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembayaran gaji, pembelian aset, dan penerimaan pajak.
- 2) Membantu dalam penyusunan anggaran dengan menyajikan data keuangan terkait pendapatan dan belanja dalam periode waktu tertentu.
- 3) Melalui akuntansi, pemerintah daerah dapat memadukan dan mengendalikan anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang telah disusun untuk membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan, menghindari pemborosan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anggaran
- 4) Akuntansi juga dapat bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang mewakili posisi keuangan dan hasil operasional pemerintah daerah yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.
- 5) Fungsi audit dan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan atau lembaga audit independen untuk memastikan bahwa catatan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 6) Akuntansi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan laporan keuangan kepada pihak eksternal seperti lembaga pengawas, auditor, dan masyarakat agar dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.1.4.4 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2018:11), sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi para pemangku kepentingan Hal ini termasuk orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan.

Menurut Henny, Rambe & Effendi (2021) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan dari berbagai macam sumber daya yaitu manusia dan juga peralatan yang memang dibuat untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya.

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2012), adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data informasi keuangan dan lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut Wilkinson (2000), sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal ataupun operasi di internal organisasi.

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan alat yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan lainnya menjadi informasi, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada pengambil keputusan. jika

sistem informasi akuntansi (SIA) terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan organisasi tidak berjalan dengan baik, dapat menghasilkan inforasi yang bisa melemahkan kinerja organisasi. Keberhasilan sistem informasi organisasi bergantung padanya cara penggunaan sistem, kemudahan penggunaan sistem bagi pengguna dan kemudahan penggunaan teknik yang digunakan.

Berkembangnya sistem informasi akuntansi dapat membawa perubahan bagi organisasi atau institusi. seperti kecenderungan untuk selalu menggunakan teknologi dalam tindakan hampir seluruh area kerja yang diimplementasikan dalam sistem komputerisasi, dengan tujuan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien waktu untuk meningkatkan keuntungan. Pengembangan sistem informasi akuntansi mempunyai dampak luas yang dapat dirasakan oleh organisasi dalam bentuk peningkatan efisiensi, membuat laporan keuangan menjadi mudah dan informasi yang didapat pun lugas atau lebih tepat. Konsekuensi negatifnya yaitu pengeluaran uang bagi organisasi cukup besar dalam memperoleh sistem informasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan apabila sistem informasi yang digunakan mengalami kerusakan.

Pengetahuan tentang teknologi informasi sudah menjadi hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintah. Selain itu, pengetahuan tentang teknologi informasi merupakan modal terpenting yang mampu bersaing di era globalisasi dan kemajuan di masa depan. untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik dapat memulai dengan pemantauan proses

perencanaan, penganggaran dan implementasi dimana melibatkan masyarakat yang aktif.

Sesuai dengan penerapan otonomi daerah, akuntansi akan terus mengalami perkembangan di Indonesia. perkembangan akuntansi pada sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan daerah digunakan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Menurut Halim, akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban untuk memberikan tanggung jawab dan menjelaskan kinerja dan aktivitas seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang mempunyai hak dan kewajiban menuntut akuntabilitas dan informasi.

Menerapkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah wajib mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Mengingat laporan keuangan yang disusun digunakan sebagai pengambilan keputusan didasarkan pada pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diakui secara universal. Maka dengan adanya sistem yang baik sangat diperlukan dalam penyusunannya sehingga dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas relevan, dapat diandalkan, sebanding, dapat dipahami dan tetap diprioritaskan transparansi-keterbukaan dan akuntabilitas.

Sistem akuntansi memiliki bentuk, dokumen, prosedur dan alat yang digunakan untuk pengolahan data yang mengacu pada unit keuangan untuk

menerima umpan balik berupa laporan yang harus dikendalikan oleh manajemen kepada perusahaan dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditor, dan lembaga pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas. Fungsi sistem dalam mengubah informasi menjadi informasi yang dapat digunakan mendukung pengambilan keputusan organisasi dengan menekankan dimensi pelaksana, informasi, proses dan teknologi informasi.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam siklus akuntansi pada pemerintahan daerah:

1) Perencanaan Anggaran.

Proses awal dalam siklus akuntansi pemerintah daerah adalah perencanaan anggaran. Anggaran pemerintah daerah tahunan yang mencakup pendapatan yang diharapkan dan mengembangkan pengeluaran yang direncanakan untuk tahun itu.

2) Pelaksana Anggaran

Setelah anggaran disetujui, pemerintah daerah melakukan pelaksanaan anggaran dengan melaksanakan program-program dan proyek-proyek yang telah dianggarkan. Selama pelaksanaan anggaran, transaksi keuangan dicatat.

3) Pencatatan Transaksi

Transaksi keuangan, termasuk pendapatan dan pengeluaran, dicatat dalam buku-buku akuntansi pemerintah. Transaksi ini mencakup pembayaran gaji, pembelian aset, pembayaran layanan publik, dan lainnya.

4) Pengolahan Transaksi

Setelah transaksi dicatat, mereka memprosesnya untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan dengan standar akuntansi pemerintahan. Proses ini meliputi verifikasi, pengecekan, dan persetujuan transaksi.

5) Pembuatan Laporan Keuangan

Pemerintah daerah secara periodik menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan situasi keuangan mereka. Laporan-laporan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan tambahan yang diperlukan.

6) Audit dan Pemeriksaan

Laporan keuangan pemerintah daerah biasanya diaudit oleh badan pemeriksa independen atau inspektorat pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman akuntansi pemerintah.

7) Publikasi Laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan diaudit, mereka harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini mencakup publikasi di situs web pemerintah atau melalui dokumen cetak yang tersedia untuk umum.

8) Evaluasi Kinerja

Pemerintah daerah harus secara berkala menerbitkan kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat agar dapat membantu membuat perubahan atau perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan selanjutnya.

Siklus akuntansi pada pemerintahan daerah sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik dalam konteks pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah dan prinsip-prinsip pelaporan yang sesuai juga sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pemerintah memerlukan sistem yang dapat menyiapkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif dan mencakup informasi mengenai status keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan serta akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyusun laporan keuangan kota dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang diperlukan. sistem informasi akuntansi menunjang pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat dan kekayaan negara. Beberapa tujuan utama sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan yaitu:

- 1) Membantu dalam memberikan transparansi terhadap penggunaan dana publik. Ini dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana publik digunakan serta memastikan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
- 2) Pemerintah dapat mengendalikan anggaran dan belanja, mematuhi kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman, serta mencegah kebijakan dana publik.

- 3) Membantu menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah termasuk alokasi sumber daya ke berbagai program atau proyek.
- 4) Dapat menghasilkan informasi laporan keuangan pemerintah yang akurat dan tepat waktu untuk diberikan kepada pihak-pihak eksternal seperti masyarakat, auditor, dan badan pengawas lainnya.
- 5) Mengawasi kinerja keuangan pemerintah serta program-program yang didanai dengan dana publik, serta dapat membantu efisiensi program-program tersebut.
- 6) Dapat membantu menjaga keamanan aset pemerintah dan mengendalikan risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah.

Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan dimaksudkan untuk membantu pemerintah menjalankan fungsinya dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan proses berkelanjutan yang digunakan pemerintah daerah untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan. Siklus ini hampir mirip dengan siklus akuntansi yang digunakan oleh bisnis, namun dengan perbedaan tertentu terkait dengan kebijakan dan praktik akuntansi pemerintah.

Bertanggung jawab atas pengoperasian sistem informasi pengolahan data yang merupakan aplikasi sistem Informasi akuntansi dasar untuk organisasi manapun. pengoperasian sistem informasi dalam organisasi telah berkembang

struktur organisasi sederhana dengan hanya beberapa orang untuk struktur kompleks yang melibatkan banyak ahli kualitas.

Mulyadi (2006:3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki 3 fungsi penting:

- 1) Mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang kegiatan sumber daya yang diterapkan dan dipengaruhi oleh organisasi manajemen, karyawan dan pihak-pihak. Itu dapat diverifikasi oleh pihak ketiga yang berkepentingan.
- 2) Mengubah informasi menjadi informasi yang berguna bagi para pihak manajemen untuk membuat keputusan menjadi tindakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
- 3) Memberikan informasi verifikasi yang memadai untuk penyimpanan nilai organisasi. Tentu juga informasi organisasi bahwa informasi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan.

Sedangkan menurut Gusherinya, & S. Samukri (2020) fungsi sistem informasi akuntansi dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi dalam Pengumpulan Data Bisnis Fungsi pertama, SIA berfungsi sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Proses tersebut dimulai dari menampung data transaksi sesuai dengan dokumen, kemudian mencatat di dalam jurnal sesuai kategorinya. Dan terakhir, mengupload pada menu buku besar secara terstruktur.

2. Sebagai Sistem Pengambilan Keputusan yang Komprehensi Fungsi kedua, sistem informasi akuntansi berperan sebagai penyedia laporan keuangan yang mana menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Di dalam data tersebut nantinya berisi laporan transaksi pihak perusahaan dan juga akan dilakukan proses evaluasi oleh tim manajemen.
3. Membangun Sistem Pengendalian Internal yang Sistematis Terakhir, SIA mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Sehingga, laporan ekonomi yang dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku untuk terciptanya aktivitas bisnis efektif dan efisien.

Menurut “Susanto, Azhar (2008;16) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai”. Menurut penelitian Perdhiansyah (2016) Indikator sistem informasi akuntansi yaitu: 1) sumber daya manusia, 2) teknologi jaringan dan informasi, 3) prosedur keuangan, 4) perangkat lunak dan, 5) perangkat keras.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah merujuk pada peran dan kontribusi dari tenaga kerja manusia yang terlibat dalam pengoperasian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem tersebut. Sumber daya manusia (SDM) yang terlebih serta memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, misalnya Accounting atau pelaku yang menjalani sistem. Manusia dalam SIA memiliki

peran krusial dalam memastikan sistem berjalan efektif dan memberikan nilai tambah pada pengelolaan keuangan daerah. Beberapa aspek penting dari SDM pada SIA dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Implementasi dan Penggunaan Sistem, staf yang menggunakan sistem informasi akuntansi harus memiliki kemampuan yang baik untuk memahami dan mengoperasikan sistem tersebut dengan efektif. sistem dirancang dengan antarmuka yang dapat dengan mudah digunakan, serta memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan agar pengguna dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem.
- 2) Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem, menyediakan tim teknis yang mampu menangani permasalahan teknis, memberikan bantuan, dan menanggapi permintaan perbaikan atau pemeliharaan serta melibatkan sumber daya manusia dalam proses pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras, serta meningkatkan fungsionalitas sistem agar tetap relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Informasi Keamanan sumber daya manusia bertanggung jawab atas manajemen akses ke sistem, memastikan hanya orang-orang yang berwenang yang dapat mengakses data serta keamanan dan pemantauan sistem keamanan untuk melindungi data keuangan dari potensi ancaman.
- 4) Analisis dan Pelaporan, sumber daya manusia perlu menganalisis dan memahami adanya kebutuhan bisnis dan informasi keuangan daerah untuk dapat menghasilkan laporan yang relevan dan bermanfaat dan dapat mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan yang akurat.

- 5) Kepatuhan dan Audit mengisyaratkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam persiapan audit internal dan eksternal, termasuk memastikan bahwa semua dokumen dan data yang diperlukan telah tersedia dan menyetujui kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Pengelolaan Proyek dan Perubahan sumber daya manusia terlibat dalam pengelolaan perubahan terkait SIA, baik itu peningkatan sistem, perubahan kebijakan, atau adaptasi terhadap perubahan kebutuhan organisasi. Jika ada implementasi atau pengembangan sistem baru, SDM terlibat dalam manajemen proyek termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan proyek tersebut.

Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang konteks keuangan dan kebijakan pemerintah daerah. Pemberdayaan SDM dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan SIA dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik.

2. Teknologi Jaringan Informasi

Teknologi Jaringan Informasi (TJI) Merujuk pada sekelompok perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang memungkinkan komunikasi, pertukaran data, dan berbagai layanan informasi antar berbagai perangkat dan komponen dalam suatu jaringan yang mencakup segala hal yang terkait dengan

penggunaan teknologi untuk mengelola, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam suatu sistem jaringan.

Pemerintah Kota Gorontalo memanfaatkan era kemajuan teknologi untuk membuat layanan semakin lebih mudah, cepat, praktis dan transparan. hampir semua pelayanan di instansi pengelola keuangan daerah tersebut telah menggunakan sistem digital. Ada beberapa aplikasi yang telah diterapkan dikota Gorontalo, yakni SIPD dan FMIS. Aplikasi ini merupakan kolaborasi dengan berbagi pakai dari Kemendagri dan BPKP dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kedua Aplikasi tersebut sangat membantu perangkat daerah agar tertib mengelola keuangan secara akuntabel.

3. Prosedur

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketika pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah dearah harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. Proses akuntansi di kota Gorontalo mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK). Pedoman ini mencakup pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan audit. Selain itu, proses akuntansi di kota Gorontalo juga harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Standar akuntasi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 adalah standar akuntansi yang berbasis akurual yang berunsur pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas.

Pemendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Pengelola keuangan daerah;
- 2) APBD;
- 3) Penyusunan rancangan APBD
- 4) Penetapan APBD;
- 5) Pelaksanaan dan penatausahaan
- 6) Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- 7) Akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- 8) Penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- 9) Kekayaan daerah dan utang daerah;
- 10) Badan layanan umum daerah;
- 11) Penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- 12) Informasi keuangan daerah;
- 13) Pembinaan dan pengawasan.

4. Perangkat Lunak

Badan Keuangan Kota Gorontalo menggunakan beberapa perangkat lunak untuk mengelola data remitansi seperti SIPD (Sistem Informasi Pembangunan daerah) yang digunakan untuk membantu pejabat daerah dalam melacak atau mengawasi proses tagihan hutang (SPP/SPM/SP2D) yang diproses oleh Badan Keuangan pada Bidang Perpendaharaan. FMIS (*Financial Management*

Information System) yang merupakan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk perencanaan anggaran, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah..

5. Perangkat Keras

Hardware atau perangkat keras berupa perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan, dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya, diterapkan dan kemampuan keuangan suatu perusahaan atau instansi untuk digunakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

2.1.5 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut hasil penelitian Siska, Novita, dan Al Azhar (2018) menyatakan bahwa bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yang artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan dalam penyajian, serta memperbaiki tingkat keandalan (*Reability*) Sistem Informasi Akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.6.1 Akuntabilitas

Fajri (2019) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kewajiban organisasi publik mengelola informasi tentang tanggung jawab pemerintah secara akurat dan tepat waktu. Br Purba (2018) mengungkapkan akuntabilitas itu merupakan tanggung jawab individu atau organisasi menyediakan dan mengungkapkan

informasi atas aktivitas kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Setyanto dkk (2018). berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas hasil keuangan, penyampaian laporan dan patuh atas kebijakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2019), Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pemegang keputusan yang di beri kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan. masyarakat sebagai pemberi amanah pada wakilnya di DPRD memberikan tugas dan tanggung jawab agar DPRD bersama lembaga eksekutif untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan referensi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban suatu individu atau organisasi untuk melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja keuangan yang disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menurut Ihyaul Ulum (2004:41). menyajikan dua jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan yang merupakan tanggung jawab yang sehubungan dengan:

- 1) Integritas Keuangan

Integritas Keuangan mencerminkan kejujuran dalam penyajian. kejujuran penyajian merupakan suatu hal yang harus ada hubungan atau korespondensi angka dan uraian akuntansi dan sumbernya. integritas

keuangan juga harus dicapai untuk memberikan informasi secara transparan menyangkut laporan keuangan daerah

2) Pengungkapan

Konsep keterbukaan penuh(*full disclosure*) memerlukan Laporan keuangan disiapkan dan disajikan sebagai kumpulan potret acara ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu serta informasi yang cukup. Hal ini sesuai dengan PP no. 24 tahun 2005 pada Lampiran II paragraf 50 yang mengatakan: “Laporkan keuangan menyajikan secara keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat dimasukkan pada halaman depan laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

3) Ketaatan peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan hal yang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan RI, UU APBN, yang mengatur tentang Peraturan hukum peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur keseimbangan keuangan peraturan pusat dan daerah, ketentuan perpu yang mengatur APBN/APBD, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah.

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggung-jawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*) Akuntabilitas vertikal adalah bentuk tanggung jawab untuk pengembangan kinerja organisasi yang akan dilaporkan kepada atasan secara berkala.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*) akuntabilitas horizontal terkait dengan organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan perkembangan kinerja yang harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai pihak eksternal dan pihak lainnya yang berhak atas tanggung jawab ini tersebut.

Tujuan pelaksanaan akuntabilitas yaitu menemukan jawaban atas pertanyaan berdasarkan hal-hal yang bertanggung jawab dengan apa terjadi dan bandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi Ketika itu hal tersebut terjadi penyimpangan atau halangan,maka harus segera diperbaiki agar pelaksanaannya bisa mencapai tujuan (Renyowijoyo, 2013). dalam mencapai tujuan tersebut, langkah yang bisa diambil menurut (Halim, 2019), yaitu:

- 1) Pelaporan yang merupakan suatu kewajiban pelaksana atau pemerintah untuk mengambil tanggung jawab dan melaporkan hasil pengelolaan dana publik.
- 2) pencarian informasi atau penelitian dari pemilik sumber keuangan atau komunitas untuk mengetahui cara kerjanya pemerintah dalam mengelola sumber keuangan.
- 3) Penilaian atau verifikasi merupakan sebuah institusi pemilik atau entitas sumber keuangan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola sumber keuangan.
- 4) pengawasan adalah tindakan pengendalian yang diambil oleh pemilik sumber dana untuk memantau pencapaian tujuan

2.1.6.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertnggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. keuangan negara diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. keuangan daerah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Pemendagri) No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak daerah tersebut.

PP No.58 Tahun 2005, Pasal 4 ayat 1 mencatat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah proses mengelola dan menggunakan keuangan secara efisien, efektif, ekonomis, mematuhi peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk umum dalam bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan. Menurut Hanafiah dkk (2016) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses untuk merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan mengawasi aktivitas pegawai pengelola keuangan Di bawah tanggung jawab APBD. Dalam hal ini peranan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna dana daerah untuk kepentingan umum dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengendalian/pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu, untuk melaksanakannya, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah agar otonomi daerah dapat dicapai dengan menciptakan pemerintah yang akuntabel (Hanafiah dkk, 2016).

Menurut Peraturan rmenteri daalam negri No. 13 Tahun 2006 Pasal 16, fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Fungsi Otorisasi Pengelolaan keuangan daerah berfungsi untuk dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu periode.
- 2) Fungsi Perencanaan Pengelolaan keuangan daerah dimanfaatkan oleh para pengelola sebagai pedoman untuk merencanakan operasional dan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang bersangkutan.

- 3) Fungsi Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah berfungsi untuk mengevaluasi keakuratan tujuan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan mencegah kecurangan yang akan terjadi.
- 4) Fungsi Alokasi Pengelolaan keuangan daerah berfungsi untuk menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan meminimalisir penggunaan sumber daya secara efisien.
- 5) Fungsi Distribusi Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk anggaran publik yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan rasa keadilan dan kesusilaan.
- 6) Fungsi Stabilisasi Pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah dasar untuk menjaga dan menstabilkan perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam sistem terstruktur yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaatnya untuk masyarakat.

2.1.6.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan terbuka kepada pihak yang berhak untuk bertanggung jawab . Superdi (2017) berpendapat bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah merupakan sebuah tanggung jawab organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat.

Mudjiyono (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah merupakan serangkaian proses internal yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan tidak terjadi kegagalan program dan kebijakan pemerintah daerah untuk dilaporkan ke DPRD dan masyarakat secara jujur dan sesuai dengan kebijakan hukum.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai 3 fungsi yang dikemukaan oleh Mardiasmo (2018):

- 1) Sebagai alat kontrol demokrasi Jika masyarakat mempunyai kesadaran dan keberanian memilih pejabat yang dapat menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, Masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah berdasarkan hasil atau program yang telah dilaksanakan agar dapat menunjukkan tanggung jawab.
- 2) Menghindari korupsi dan penyalahgunaan jabatan Kekuasaan cenderung korupsi (Power trend to corrupt) yang biasanya dilakukan oleh pegawai atau pejabat pemerintah yang mengendalikan semua sumber daya. Oleh karena itu korupsi dan penyalahgunaan jabatan harus dicegah sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi dengan melakukan pengendalian internal, penyusunan laporan keuangan diperiksa oleh BPK dan prosedur pengadaan dan layanan publik yang dilakukan secara transparan.

- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kinerja adalah tentang menyelesaikan sesuatu Itu benar. Instansi pemerintah harus melakukan perbaikan agar dapat meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi dan benchmark lembaga pemerintah yang berfungsi secara efesien. efektivitas berhubungan dengan peningkatan keefektifan kegiatan yang dapat memberikan tambahan nilai untuk pelayanan publik sehingga dapat mencapai akuntabilitas.

Oleh karena itu, jika akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik maka masyarakat dapat menerima manfaat yang besar. Pejabat bisa mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah peroleh, meminimalkan terjadinya korupsi serta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik meningkat.

Menurut Fajri (2019), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan beberapa hal prinsip, yaitu:

- 1) Pejabat publik harus mempunyai komitmen terhadap organisasi dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
- 2) Adanya sistem penggunaan sumber daya secara konsisten dengan kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Berorientasi pada ketepatan tujuan, sasaran, visi dan misi, hasil dan manfaat.
- 4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban harus secara akurat, jujur dan transparan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa Prinsip ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan organisasi yang membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo (2018), pemegang amanah/pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyajikan dan wajib melaporkan segala kegiatannya kepada pemangku kepentingan yang mempunyai hak dan wewenang untuk menerima tanggung jawab. melaksanakan informasi untuk melindungi hak-hak publik, termasuk hak atas diberi tahu (*Right to be information*) dan hak untuk didengarkan (*Right to be hearing*). Laporan keuangan pemerintah digunakan dalam bentuk pemberitahuan administrasi pemerintahan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor dan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.

Agar pengelolaan dana masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lebih transparan, ekonomi, efisien, efektif dan akuntabel, kiranya pemerintah daerah harus menggunakan konsep *value for money*, hingga akhirnya terwujud akuntabilitas publik. Konsep *value for money* yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola dana masyarakat pada dasarnya mencakup tiga elemen penting yakni:

- 1) Ekonomis, mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya masukan (*input resources*) seminimal mungkin.

- 2) Efisiensi, mengukur sejauh mana pemerintah dapat mencapai keluaran optimal dengan sumber daya masukan seminimal mungkin (*output/input*)
- 3) Efektivitas, mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa:

- 1) Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik..

Idikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Mudjiyono (2018) antara lain: 1) akuntabilitas program, 2) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 3) akuntabilitas proses dan, 4) akuntabilitas kebijakan

1. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan tujuan dan program yang telah dilaksanakan sudah efektif dan efisien dimana hasil yang diperoleh sudah maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Pengauditan terhadap akuntabilitas program tersebut disebut program audit dan merupakan perwujudan pemeriksaan efektivitas lembaga sektor publik.

2. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan perilaku untuk menghindari suatu tindakan penyimpangan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan ketataan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan kejujuran lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan kejujuran oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

3. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses merupakan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah diterapkan dengan baik untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah dari sudut biaya. Audit terhadap akuntabilitas proses pemerintah daerah meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan sistem akuntansi manajemen, prosedur administrasi dan struktur organisasi pemerintah daerah. Perlunya audit akuntabilitas proses pada pemerintah daerah untuk memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam proses pelayanan tersebut. Pengauditan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemeriksaan proses tender tersebut adalah apakah tender dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang ada ataukah menyalahi peraturan tersebut.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebagai eksekutif kepada DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Pada masa sekarang ini audit terhadap akuntabilitas kebijakan

terkait dengan tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, tidak banyak ditemukan judul yang berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan penulis. Sebagian besar penelitian sebelumnya berhubungan dengan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas, serta sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai data pendukung yang relevan dengan topik yang dibahas dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

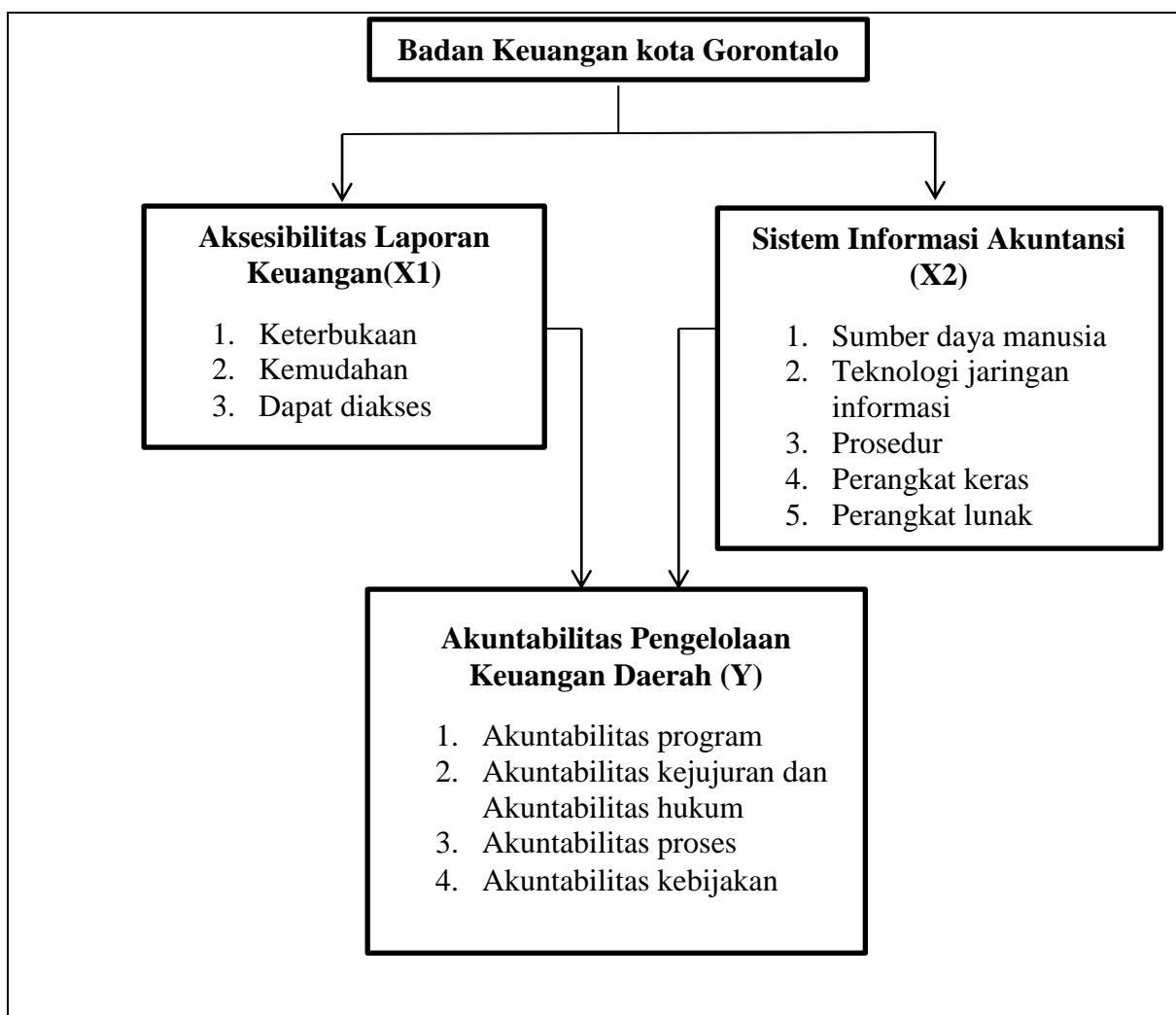
NO	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Luh Wulan Artini Putu Deddy Samtika Putra 2020	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)	Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung. Sedangkan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.
2	Zeny antika, Yunika murdyanti, Hafifah nasution	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas laporan keuangan dan Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

NO	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	2020	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, semakin baik Aksesibilitas laporan keuangan dan Pengendalian Internal maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat.
3	Senda Yunita dan Leatemia Paul Usmany 2021	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini bermakna bahwa semakin baik Penyajian Laporan Keuangan Daerah maka semakin baik pula Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. namun pada Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah karena laporan keuangan daerah belum dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan informasi laporan keuangan daerah sulit untuk diakses oleh pihak eksternal.
4	Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L 2018	Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Pengaruh Sistem Alokasi Dana Desa.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2019:95), “Kerangka pikir/ cara berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor yang ada dalam menilai masalah yang serius”. Kerangka berpikir menjelaskan pola hubungan antara variabel yang ingin diteliti yaitu hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y). Dalam penelitian ini, variabel

independen yang ingin diteliti yaitu Aksesibilitas (X1) Dan Sistem Informasi Akuntansi(X2). Variabel dependen yang diteliti adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y). Subjek penelitiannya adalah Badan Keuangan yang ada di Kota Gorontalo. Berdasarkan kajian teori diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka pikir

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2)

1. Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dengan terlaksananya aksesibilitas laporan keuangan yang tepat dapat mewujudkan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Proses inilah yang merupakan media untuk menciptakan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun tiga indikator aksesibilitas laporan keuangan menurut (Fauziyah dan Handyani, 2017 dalam Zeny et al.,2020) yaitu: 1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa; 2) Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi keuangan daerah; dan 3) Dapat diakses (mudah tersedia), artinya masyarakat mempunyai akses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.
2. Sistem informasi akuntansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan dalam penyajian, serta memperbaiki tingkat keandalan (*Reliability*) Sistem Informasi Akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban. Menurut penelitian Perdhiansyah (2016) Indikator sistem informasi akuntansi yaitu: 1) sumber daya

manusia, 2) teknologi jaringan dan informasi, 3) prosedur keuangan, 4) perangkat lunak dan, 5) perangkat keras.

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang timbul akibat dipengaruhi oleh variabel independen/variabel bebas (Sugiyono, 2015). Dimana variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) yang merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas pengelolaan keuangan daerah seperti penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mengasilkan kebijakan yang nantinya hasil kebijakan tersebut disampaikan kepada publik sehingga publik mempercayai pemerintah sebagai pemegang amanah untuk mengelola kekayaan daerah. Idikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Mudjiyono (2018) antara lain: 1) akuntabilitas program, 2) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 3) akuntabilitas proses dan, 4) akuntabilitas kebijakan

2.4 Hipotesis

1. Aksesibilitas (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo.
2. Aksesibilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo.
3. Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Djadja Siswanto, objek penelitian adalah peristiwa, aktivitas, individu, kelompok, atau masalah yang dijadikan sebagai sasaran penelitian untuk diuraikan, dijelaskan, atau diidentifikasi. berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. sedangkan subjek pada penelitian ini adalah Badan Keuangan kota Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan kuisioner yang akan diberikan kepada responden dengan survei langsung pada Badan Keuangan kota Gorontalo. Survei dilakukan kepada sekumpulan objek yang cukup banyak dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi tidak seluruh objek akan diteliti, hanya melalui perwakilan dari seluruh objek tertentu (Notoatmodjo, 2012:35).

Menurut Sugiyono(2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkret), yang berupa angka-angka yang akan diukur dengan menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah atribut atau karakteristik atau nilai seseorang, objek atau aktivitas yang bervariasi yang telah peneliti tentukan untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Operasi variabel adalah penjelasan variabel penelitian, dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu; variabel independen dan dependen. menurut (Sugiyono, 2019:69) variabel independen (bebas), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau terjadinya variabel terikat (dependent). Sedangkan variabel terikatnya adalah variabel itu yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen.

Dalam mengidentifikasi data yang digunakan pada penelitian, maka terlebih dahulu menentukan indikator-indikator untuk setiap variabel. Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel bebas (X), Aksesibilitas (X1) dimana masyarakat dimudahkan dalam mengakses sebuah laporan keuangan, Sistem Informasi Akuntansi (X2) yang digunakan pemerintah daerah untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan. sedangkan variabel terkaitnya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) yang merupakan bentuk tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan terbuka. Adapun indikator dari variabel – variabel tersebut diatas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel X

Variabel	Indikator	Sumber	Skala
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1)	1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. Dapat Diakses	Fauziyah dan Handayani, 2017 dalam Zeny <i>et al.</i> ,2020)	Ordinal
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	1. Sumber Daya Manusia 2. teknologi Jaringan 3. Prosedur 4. Perangkat Keras 5. Perangkat Lunak	Perdhiansyah (2016)	Ordinal

Tabel 3. 2 Operasional Variabel Y

Variabel	Indikator	Sumber	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	1. Akuntabilitas Program 2. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 3. Akuntabilitas Proses 4. Akuntabilitas Kebijakan	Mudjiyono (2018)	Ordinal

Untuk melakukan test masing-masing variabel, maka dapat diukur dengan memakai instrumen kuisioner dengan skala *likert*. menurut Ridwan (2010 : 86), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok mengenai peristiwa atau gejala sosial. teknik skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memberikan skor pada tiap jawaban dari responden. jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai ke sangat negatif (Sugiyono, 2012).

kuesioner disusun dengan menyediakan 5 pilihan serta bobot yang diberikan seperti pada tabel yang tampak berikut ini:

Tabel 3. 3 Bobot nilai variabel

Pilihan	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Riduwan (2004: 86)

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2017:119). maka dari itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Badan Keuangan kota Gorontalo yang terdiri dari 123 orang.

Tabel 3. 4 Populasi Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah
1	Sekretariat	26 orang
2	Anggaran	13 orang
3	Akuntansi	13 orang
4	Pendapatan	33 orang
5	Perbendaharaan	20 orang
6	Aset	18 orang
Jumlah		123 orang

Sumber: Badan keuangan kota Gorontalo,2023.

3.2.3.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti yang mampu menggambarkan populasi tersebut secara optimal. sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sampel yang sesuai dengan kriteria dan karakteristik peneliti yaitu orang yang dianggap paling berpengaruh dan paling penting mengenai akuntabilitas publik terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. dalam menentukan sampel terdapat beberapa teknik dalam pengambilan sampel. teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Proportionate stratified random sampling*.

Teknik *Proportionate stratified random sampling* merupakan teknik penarikan sampel bila mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dengan menggunakan teknik *Proportionate stratified random sampling* dapat mengukur besaran sampel yang akan diteliti oleh peneliti dengan menggunakan rumus Slovin. Besaran sampel yang akan diteliti sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Sampling eror adalah 5%

Dari rumus diatas didapat angka sebagai berikut:

$$n = \frac{123}{1 + 123(0,05)^2}$$

$$n = \frac{123}{1 + 123 \times 0,0025} = \frac{123}{1 + 0,3075} = \frac{123}{1,3075} = 94,07$$

Maka jumlah sampel yang digunakan setelah dibulatkan yaitu sebanyak 94 orang (Responden).

Dengan pembagian sampel strata:

$$\text{Sekretariat: } \frac{26}{123} \times 94 = 20$$

$$\text{Anggaran: } \frac{13}{123} \times 94 = 10$$

$$\text{Akuntansi: } \frac{13}{123} \times 94 = 10$$

$$\text{Pendapatan: } \frac{33}{123} \times 94 = 25$$

$$\text{Perbendaharaan: } \frac{20}{123} \times 94 = 15$$

$$\text{Aset: } \frac{18}{123} \times 94 = 14$$

Tabel 3. 5 Sampel Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah
1	Sekretariat	20 orang
2	Anggaran	10 orang
3	Akuntansi	10 orang
4	Pendapatan	25 orang
5	Perbendaharaan	15 orang
6	Aset	14 orang
Jumlah		94 orang

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2023

3.2.4 Jenis dan Sumber Data serta Metode Pengumpulan Data

3.2.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data Ordinal. Menurut Sugiyono, data ordinal atau skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Data ordinal merupakan data yang menomoran objek atau pernyataan yang disusun menurut besarnya suatu urutan, yaitu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau jarak tidak harus sama. Contoh dari data ordinal adalah tingkat kepuasan (misalnya, sangat puas, puas, tidak puas) atau tingkat pendidikan (misalnya, SD, SMP, SMA , Sarjana).

3.2.4.2 Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, sumber data primer merupakan data yang diberikan langsung oleh responden yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui penyebaran kuesioner.
2. Data sekunder, data yang didapat dan diolah dari sumber internet yang didapatkan dari Badan Keuangan Kota Gorontalo serta sumber ekstern yang diperoleh melalui jurnal, literatur serta pulikasi dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan saat ini.

3.2.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan peninjauan.
2. Wawancara, dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak pegawai yang berkaitan tentang masalah yang terjadi.
3. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarluaskan kuisioner kepada responden atau ke pegawai yang terlibat berdasarkan indikator yang terdapat pada operasional variabel.
4. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan literasi atau mempelajari buku dan jurnal untuk memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan teori serta konsep dalam masalah penelitian ini.

3.2.5 Analisis Instrumen Penelitian

Analisis instrumen penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi kualitas instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, tes, atau alat pengukur lainnya. Untuk mendapatkan data yang baik atau objektif tentu akan memerlukan adanya alat ukur yang valid dan andal (*Reliable*). Agar dapat menyakini instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen yang digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga menghasilkan data yang objektif.

3.2.5.1 Validitas

Dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer berupa instrumen pertanyaan dalam bentuk kuesioner/angket maka dilakukan pengujian

validitas untuk semua instrumen yang digunakan. Pengujian validitas berguna untuk menguji instrumen sebelum digunakan untuk menghasilkan jawaban yang benar sesuai dengan pernyataan yang dibuat. Uji validitas dapat mempengaruhi hasil pengujian statistik.

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) juga valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur serta dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu objek dengan benar.

Riduwan (2012) menyatakan uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur.

3.2.5.1.1 Rumus Uji Validitas

Pengukuran validitas dengan menggunakan cara mengorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Pengukuran validitas dapat menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut :

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n. \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}. \{n. \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Sumber: Riduwan (2004)

Keterangan:

r_{hitung} = Koefisien korelasi

$\sum X_i$ = Jumlah skor intern

$\sum Y_i$ = Jumlah skor total (seluruh intern)

n = Jumlah responden

3.2.5.1.2 Pengujian Validitas

Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi pearson product momen yang hasilnya akan diuji untuk memenuhi unsur validitas atau tidak. Pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Menggunakan nilai signifikansi

Penggunaan nilai signifikansi berupa nilai error term digunakan peneliti untuk menentukan tingkat kesalahan yang ditolelir dalam suatu pengujian statistik. Nilai signifikansi tersebut terdiri dari nilai sig 1%, 5%, dan 10%. pengujian statistik ilmu sosial biasanya nilai signifikansi yang digunakan adalah 5%. Cara menggunakan nilai signifikansi ini yaitu dengan membandingkan nilai sig pada hasil pengujian validitas dengan nilai sig yang ditentukan. Apabila nilai sig uji validitas < dari nilai sig yang ditentukan (5%) maka instrumen tersebut dikatakan “valid”. Sebaliknya

jika nilai sig uji validitas > dari nilai sig yang ditentukan (5%) maka instrumen tersebut dikatakan “tidak valid”.

2. Menggunakan nilai korelasi

Penggunaan nilai korelasi (r hitung) yaitu nilai hasil perhitungan uji validitas itu sendiri yang dibandingkan dengan nilai korelasi yang ditentukan. Menurut Sugiyono (2012) jika nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari nilai korelasi yang ditentukan (r kritis = 0,30) maka instrument tersebut adalah “valid”, sebaliknya jika nilai korelasi lebih kecil dari nilai (r kritis = 0,30) maka instrumen tersebut “tidak valid”.

3. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

Menurut Riduwan (2012) setelah nilai korelasi diperoleh maka tahap selanjutnya adalah mencari nilai t hitung dari setiap instrumen tersebut dengan menggunakan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi hasil r hitung

n = jumlah responden

3.2.5.2 Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu

dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaan ataupun pernyataan yang telah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. metode ini sangat cocok digunakan pada sektor berbentuk skala atau skor rentan, dimana uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien *Alfa* (α) dari *Cronbach* dengan rumus (Umar,2003):

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(-\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_b^2} \right) \text{ dan } \sigma = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

Dimana:

- r₁₁ = Reliabilitas instrumen
- k = Banyak butir pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir
- n = Jumlah responden
- X = Nilai skor yang dipilih

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali) dengan menggunakan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha* (α). suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60 (Ghazali, 2005).

3.2.6 Metode Analisis Data

Sugiyono (2019:206) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah semua data dari responden dikumpulkan. pemrosesan data dilakukan dengan cara data yang telah dikumpulkan, diproses dan kemudian dibuat dalam bentuk tabel.

Sugiyono (2019: 146) mengatakan bahwa skala *likert* digunakan sebagai ukuran sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok orang tentang fenomena yang ada. Skala liket diukur, kemudian dijelaskan sebagai variabel indikator dan sebagai titik awal untuk mengukur instrumen dalam bentuk pertanyaan. jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala *likert* memiliki gradasi positif. jika jawaban alternatif bernilai 5, maka nilai tersebut dijumlahkan kedalam pembobotan skala Aksesibilitas (X1) dan Sistem Informasi akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi berganda.

Menurut Sugiyono (2021:275) menyatakan bahwa analisis regresi berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel bebas (Kriteria), bila dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Model regresi pada penelitian ini yaitu untuk dua prediktor seperti berikut;

$$Y = a + \beta_1.x_1 + \beta_2.x_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

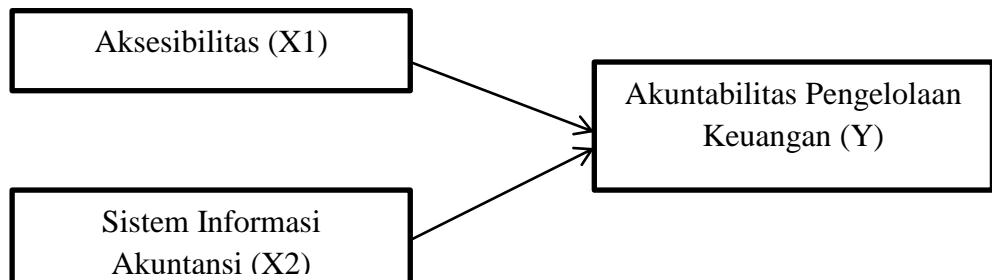
a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien

X_1 = Aksesibilitas

X_2 = Sistem Informasi Akuntansi

ϵ = Eror Term



Gambar 3. 1 Struktur Regresi Berganda

Kemudian data yang terkumpul dalam analisis hubungan sebab akibat antara variabel atau dimensi dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan efeknya.

3.2.6.1 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode regresi dalam penelitian ini menyebabkan perlu dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan penyimpangan asumsi klasik (Gujarati, 2003). Syarat yang perlu dilakukan untuk dalam uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas

1. Uji Normalitas Data

Sugiyono (2018:234) menyatakan bahwa hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan Statistik Parametris, antara lain dengan menggunakan *t-test* untuk satu sampel, korelasi dan regresi, analisis varian dan *t-test* untuk dua sampel. penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka harus terlebih dahulu harus melakukan pengujian normalitas data.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi yang ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. model regresi yang baik tidak akan ada kolerasi antar variabel independen (Ghozali,2009). untuk mendeteksinya dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. suatu model regresi yang terdapat multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali,2009). Sebuah scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual dapat digunakan untuk menilai ada

atau tidaknya heteroskedastisitas. Berikut ini adalah pilar analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas:

1. Heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, kemudian meruncing).
2. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas maka tidak ada pola yang jelas seperti hamburan titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.2.7 Pengujian Hipotesis

3.2.7.1 Uji F (Uji Simultan)

Digunakan untuk membuktikan apakah ada pengaruh simultan pada variabel dependen bersama-sama jika perbandingan antara F_{hitung} dengan tabel F pada tingkat kepercayaan 5% jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga semua variabel dependen memiliki efek bersama yang sama pada variabel tak bebas.

3.2.7.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial individu adalah prosedur untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji statistik. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Satu per satu). Tes ini dilakukan dengan membandingkan nilai dalam tabel t. jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ dengan signifikan dibawah 0,05% (5%). jadi secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Gorontalo yaitu Badan Keuangan Kota Gorontalo yang beralamat di Jl. Nani Wartabone, Ipilo, Kec. Kota Timur., Kota Gorontalo, Gorontalo 96133.

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Keuangan Kota Gorontalo

Badan Keuangan Kota Gorontalo merupakan instansi pemerintah Kota Gorontalo yang berkedudukan sebagai Badan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo terdiri dari 6 bidang yaitu sekretariat, pendapatan, anggaran, pembendaharaan, akuntansi dan aset yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo.

Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Gorontalo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo maka Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

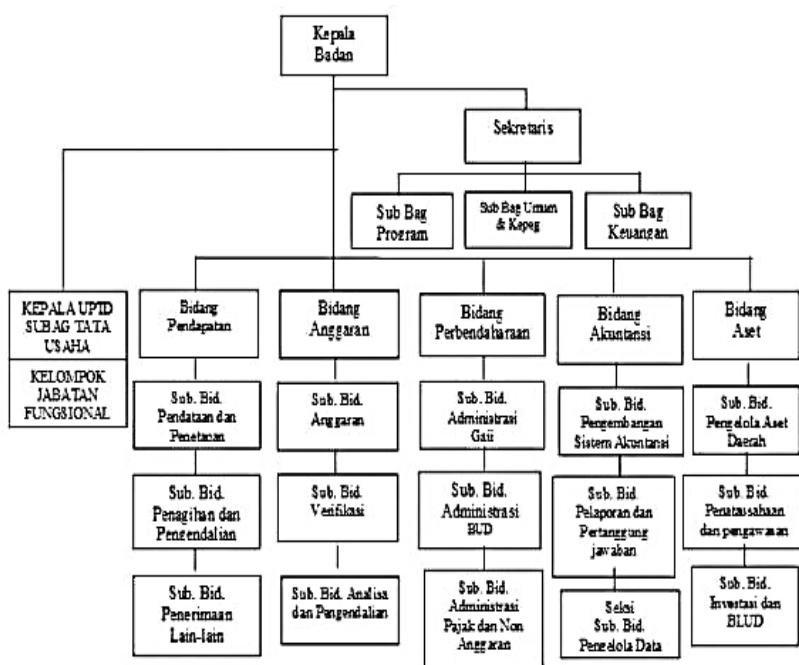
1. Tugas Pokok Badan Keuangan Kota Gorontalo

Tugas Pokok Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan.

2. Fungsi Badan Keuangan Kota Gorontalo

Fungsi Badan Keuangan Kota Gorontalo yaitu Merumuskan kebijakan, Melaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo

Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pendapatan, yang terdiri dari Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian dan Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;
- 4) Bidang Anggaran, yang terdiri dari Sub Bidang Anggaran, Sub Bidang Verifikasi dan Sub Bidang Analisa dan Pengendalian;
- 5) Bidang Perpendaharaan, yang terdiri dari Sub Bidang Administrasi Gaji, Sub Bidang Administrasi BUD dan Sub Bidang Administrasi Non Anggaran;
- 6) Bidang Akuntansi, yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi, Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Sub Bidang Pengelola Data;
- 7) Bidang Aset, yang terdiri dari Sub Bidang Pengelola Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan dan Pengawasan dan Sub Bidang Investasi dan BLUD

4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kota Gorontalo

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam bidang anggaran, pendapatan, akuntansi dan aset daerah.

Tugas dan fungsinya:

- 1) Merencanakan tugas pada bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah.
- 2) Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pada bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3) Mengorganisir kegiatan pada bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan sistem dan prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan tugas pada bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah secara terpadu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Mengarahkan pelaksanaan program peningkatan pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah secara inovatif dan proaktif untuk peningkatan kinerja.
- 6) Membina pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh untuk kelancaran tugas.

- 7) Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- 8) Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan.
- 9) Mengevaluasi seluruh kegiatan secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- 10) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk petunjuk lebih lanjut kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat.

2. Sekretariat

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

- 1) Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan dan tertibnya administrasi keuangan dan untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit.
- 3) Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.

- 4) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
- 5) Mengkoordinasikan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- 6) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

- 1) Menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis pendataan dan penetapan retribusi daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar melaksanakan tugas.
- 2) Menyusun rencana kegiatan pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang tersedia untuk menjadi program unit.
- 3) Melaksanakan pendataan obyek/subyek pajak dan retribusi daerah secara terkoordinir untuk mengetahui gambaran dan jumlah pajak terhutang.

- 4) Melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang berdasarkan ketentuan sebagai dasar penetapan pajak terhutang.
- 5) Melakukan verifikasi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan sesuai daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan dokumen pajak bumi dan bangunan lainnya untuk didistribusikan kepada unit pengelola.
- 6) Menglionsutasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun APBD beserta perubahan APBD serta melaksanakan pengendalian anggaran.

- 1) Menyiapkan kebijakan teknis bidang anggaran berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dasar pelaksanaan tugas.
- 2) menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahannya.

- 3) Melakukan pengendalian anggaran dalam penyusunan APBD dan perubahannya.
- 4) Meneliti dan mengevaluasi atas pengajuan SPP/SPM serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
- 5) Mengawasi pengelolaan aplikasi simda keuangan.
- 6) Memberikan pembinaan dan sosialisasi atas peraturan perundangundangan keuangan daerah.
- 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 8) Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis kejada pimpinan dan bidang lain.

5. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Gaji dan Administrasi BUD serta Kas non anggaran.

- 1) Menyiapkan kebijakan teknis bidang perbendaharaan berdasarkan ketentiaan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung

dan belanja non anggaran sesuai ketentuan untuk persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- 3) Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan/atau penempatan uang daerah pada bank umum dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
- 4) Menelaah dan meneliti serta memberikan saran pertimbangan kepada PPKD atas permohonan Tambah Uang (TU) SKPD berdasarkan ketersediaan dana pada kas umum daerah;
- 5) Menyiapkan dan mengatur ketersedian dana pada kas pengeluaran serta menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 6) Melakukan penatausahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan.
- 7) Melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- 8) Menyiapkan pelaksanaan kerja sama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
- 9) Melaksanakan administrasi dan penatausahaan atas hak dan kewajiban pemerintah daerah.
- 10) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan kas non anggaran dan mengelola daftar gaji sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar (SPM) gaji oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

- 11) Melakukan proses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;melakukan proses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS.
- 12) Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait sehubungan dengan permasalahan pembayaran gaji PNS yang memasuki batas usia pensiun.

6. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas dibidang akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- 1) Menghimpun kebijakan teknis dibidang akuntansi sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mengevaluasi dan membantu SKPD dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan perundangundangan.
- 3) Merumuskan dan menyusun kebijakan akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

- 4) Menyusun rencana kerja dibidang akuntansi sesuai ketentuan untuk menjadi program unit.
- 5) Menghimpun dan mengelola data keuangan berdasarkan laporan realisasi keuangan satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rancangan pertanggung jawaban kepala daerah.
- 6) Mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya pengelolaan administrasi keuangan.
- 7) Menyusun laporan realisasi anggaran seituan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) berdasarkan laporan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- 8) Melakukan penelitian terhadap penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan satusm kerja perangkat daerah berdasarkan laporan setiap satuan kerja perangkat daerah untuk keakui-atan data.
- 9) Melakukan penyimpanan data akuntansi dengan sistem komputerisasi sebagai bahan dokumentasi.
- 10) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala/kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

- 12) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- 13) menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

7. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan perundangan untuk tertibnya barang milik daerah.

- 1) Menghimpun dan menyusun kebijakan teknis pengelolaan aset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyusun rencana kegiatan pengelolaan aset daerah sesuai kebutuhan untuk menjadi program SKPD/UPB.
- 3) Menginventarisir barang milik daerah sesuai jenisnya untuk mengetahui keadaan kekayaan daerah.
- 4) Melaksanakan rekonsiliasi data aset daerah dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
- 5) Menghimpun dan mengelola data aset daerah sesuai jenisnya untuk mengetahui jumlah kekayaan daerah.
- 6) Mengelola aset sesuai fungsinya untuk dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

- 7) Merencanakan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai pendukung kinerja pemerintah daerah.
- 8) Melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah secara berkala dan terpadu untuk agar dapat difungsikan dengan baik.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Melakukan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- 11) Melakukan penatausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- 14) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk.

4.1.4 Visi dan Misi Badan Keuangan Kota Gorontalo

Badan Keuangan Menjadi Institusi Pengelola Keuangan dan Aset yang "Inovatif" dan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur

4.1.5 Karakteristik Responden

4.1.5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Responden)	Presentase (%)
Laki-laki	43	46%
Perempuan	51	54%
Total	94	100%

Sumber: Data olahan, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 43 orang atau sekitar 46%, sedangkan responden perempuan pada penelitian ini berjumlah 51 orang atau sekitar 51%. hal ini menunjukkan bahwa tidak seimbangnya jumlah laki-laki dan perempuan.

4.1.5.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase (%)
Magister (S2)	14	15%
Sarjana (S1)	61	65%
D3	6	6%
SMA/Sederajat	13	14%
Total	94	100%

Sumber : Data olahan, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir para responden pada magister (S2) sebanyak 14 orang atau 15%, untuk sarjana (S1) sebanyak 61 orang atau 65%, untuk diploma atau D3 sebanyak 6 orang atau 6% dan untuk SMA/Sederajat sebanyak 13 orang atau 14%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian dengan menggambarkan setiap indikator dengan membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pernyataan. Perhitungan mengenai skala penilaian sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya.

Setelah itu, dapat dibuatkan skala penilaian skor untuk masing-masing item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya yaitu:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 94 = 94$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 5 \times 94 = 470$$

$$\text{Rentang scalanya yaitu : } = \frac{470 - 94}{5} = \frac{376}{5} = 75,2 = 75$$

Tabel 4. 3 Rentang Skala

No	Rentang	Kategori
1	94 – 169	Sangat Rendah
2	170 – 245	Rendah
3	246 – 321	Sedang
4	322 – 397	Tinggi
5	398 – 470	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan, 2024

Berikut deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pernyataan pada masing-masing indikator.

4.2.1.1 Aksesibilitas (X1)

Berdasarkan hasil tabulasi data yang ada pada kuesioner yang telah diperoleh dari responden dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 4. 4 Distribusi Jawaban Responden (X1)

Bobot	Pertanyaan 1			Pertanyaan 2			Pertanyaan 3			Pertanyaan 4		
	F	Skor	%									
5	3	160	34	3	175	37	3	185	40	3	150	32
	2			5			7			0		
4	5	236	63	5	236	63	5	204	54	6	240	64
	9			9			1			0		
3	3	9	3	0	0	0	6	18	6	4	12	4
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	9	405	100	9	411	100	9	407	100	9	402	100
Kategori	Sangat Tinggi											
Bobot	Pertanyaan 5			Pertanyaan 6			Pertanyaan 7			Pertanyaan 8		
	F	Skor	%									
5	3	170	36	3	165	35	2	145	31	3	195	42
	4			3			9			9		
4	5	212	57	5	232	62	6	256	68	4	196	52
	3			8			4			9		
3	7	21	7	3	9	3	1	3	1	6	18	6
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	9	403	100	9	406	100	9	404	100	9	409	100
Kategori	Sangat Tinggi											

Sumber : Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 94 responden secara umum persepsi responden terhadap item pernyataan

pada variabel aksesibilitas (X1), umumnya berada dalam kategori **Sangat Tinggi**. hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jumlah dari keseluruhan yaitu 406 sehingga aksesibilitas yang dilakukan Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam kategori yang sangat baik.

Skor untuk item pernyataan yang paling tinggi yaitu 411 dari pernyataan nomor 2 dimana laporan keuangan daerah disajikan secara lengkap untuk umum sehingga dinilai sangat tinggi. sedangkan untuk item pernyataan yang skornya lebih kecil yaitu pada nomor 4 laporan keuangan mudah untuk diakses dengan perolehan skor sebesar 402 yang masih berada dalam kategori Sangat Tinggi.

4.2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil tabulasi data yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) seperti berikut:

Tabel 4. 5 Distribusi Jawaban Responden (X2)

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	94	416	100	94	393	100	94	400	100	100
Kategori	Sangat Tinggi			Tinggi			Sangat Tinggi			
Bobot	Pertanyaan 7			Pertanyaan 8			Pertanyaan 9			
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	
5	21	105	22	27	135	29	31	155	33	
4	71	284	76	67	268	71	63	252	67	
3	2	6	2	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah	94	395	100	94	403	100	94	407	100	
Kategori	Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			

Sumber : Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah 94 responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) umumnya berada pada kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai rata-rata keseluruhan nilai skor yaitu 400. hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam kategori dalam kategori yang sangat baik.

Skor item paling tinggi pada variabel ini yaitu pada nomor 4 proses pengelolaan keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan dengan skor 416 yang termasuk dalam kategori yang sangat tinggi menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi. sedangkan skor item yang paling rendah yaitu pada nomor 5 bekerja sesuia dengan pedoman mengenai pengelolaan keuangan dengan skor 393 yang termasuk dalam kategori tinggi.

4.2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil tabulasi data yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) seperti berikut:

Tabel 4. 6 Distribusi Jawaban Responden (Y)

Bobot	Pertanyaan 1			Pertanyaan 2			Pertanyaan 3			Pertanyaan 4		
	F	Skor	%									
5	35	175	37	17	85	18	46	230	49	37	185	39
4	47	188	50	41	164	44	47	188	50	40	160	43
3	12	36	13	36	108	38	1	3	1	17	51	18
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	94	399	100	94	357	100	94	421	100	94	396	100
Kategori	Sangat Tinggi			Tinggi			Sangat Tinggi			Tinggi		
Bobot	Pertanyaan 5			Pertanyaan 6			Pertanyaan 7			Pertanyaan 8		
	F	Skor	%									
5	52	260	55	68	340	73	34	170	36	38	190	40
4	37	148	40	24	96	25	58	232	62	50	200	54
3	5	15	5	2	6	2	2	6	2	6	18	6
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	94	423	100	94	442	100	94	408	100	94	408	100
Kategori	Sangat Tinggi											
Bobot	Pertanyaan 9			Pertanyaan 10			Pertanyaan 11			Pertanyaan 12		
	F	Skor	%									
5	35	175	38	44	220	47	41	205	44	44	220	47
4	54	216	57	50	200	53	46	184	49	49	196	52
3	5	15	5	0	0	0	7	21	7	1	3	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	94	406	100	94	420	100	94	410	100	94	419	100
Kategori	Sangat Tinggi											
Bobot	Pertanyaan 13			Pertanyaan 14			Pertanyaan 15					
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%			
5	45	225	48	44	220	47	46	230	49			
4	42	168	45	49	196	52	48	192	51			

3	7	21	7	1	3	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	94	414	100	94	419	100	94	422	100
Kategori	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				

Sumber : Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah 94 responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) umumnya berada pada kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai rata-rata keseluruhan nilai skor yaitu 410. hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Badan Keuangan Kota Gorontalo termasuk dalam kategori dalam kategori sangat baik.

Skor item pernyataan yang mendapat skor paling tinggi yaitu pada nomor 6 memiliki kewajiban untuk bertindak jujur dalam segala aspek pekerjaan dengan skor 442. hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo berkewajiban untuk bertindak jujur dalam segala aspek pekerjaan. sedangkan untuk perolehan skor yang paling rendah yaitu pada nomor 2 laporan keuangan yang disusun dapat dijadikan tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan pada tahun selanjurnya dengan skor 357 yang termasuk dalam kategori tinggi.

4.2.2 Uji Validitas dan Reabilitas

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Aksesibilitas (X1)

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan yang disebar kepada responden valid atau sesuai dengan alat ukur yang digunakan. pengujian dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing daftar

pernyataan dengan skor totalnya setelah di uji kevalidannya. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Aksesibilitas (X1) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Aksesibilitas (X1)

Indikator	Uji Validitas dan Reliabilitas				
	R hitung	Ket	Cronbach' Alpha	Standar	Keterangan
X1.1	0.499 (49.9%)				Valid dan Reliabel
X1.2	0.601 (60.1%)				Valid dan Reliabel
X1.3	0.662 (66.2%)				Valid dan Reliabel
X1.4	0.582 (58.2%)				Valid dan Reliabel
X1.5	0.582 (58.2%)	Valid Jika $r > 0.30$	0.930	$> 0.60 =$ Reliabel	Valid dan Reliabel
X1.6	0.648 (64.8%)				Valid dan Reliabel
X1.7	0.569 (56.9%)				Valid dan Reliabel
X1.8	0.579 (57.9%)				Valid dan Reliabel

Sumber : Data olahan 2024

Dari tabel diatas dapat menjelaskan bahwa semua item untuk sub variabel Aksesibilitas (X1) semua instrumen menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. Keputusan valid ini di ambil karena seluruh item nilai r hitung yang lebih besar dari t tabel 0.30. dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Aksesibilitas (X1) adalah Valid

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.930	3

Pengujian reliabel *cronbach's alpha* sebesar 0,930 Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai alpha 0,60 masih lebih besar nilai *cronbach's alpha* nya, dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Aksesibilitas (X1) adalah Reliabel.

4.2.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Indikator	Uji Validitas dan Reliabilitas				
	R hitung	Ket	Cronbach' Alpha	Standar	Keterangan
X2.1	0.372 (37.2%)				Valid dan Reliabel
X2.2	0.559 (55.9%)				Valid dan Reliabel
X2.3	0.608 (60.8%)				Valid dan Reliabel
X2.4	0.374 (37.4%)	Valid Jika $r > 0.30$	0.927	$> 0.60 =$ Reliabel	Valid dan Reliabel
X2.5	0.460 (46%)				Valid dan Reliabel
X2.6	0.444 (44.4%)				Valid dan Reliabel

X2.7	0.528 (52.8%)	Valid dan Reliabel
X2.8	0.541 (54.1%)	Valid dan Reliabel
X2.9	0.571 (57.1%)	Valid dan Reliabel

Sumber : Data Olahan 2024

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	3

Dari data tabel diatas menjelaskan bahwa dimana seluruh item pernyataan untuk sub variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) seluruh item instrumen menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. Keputusan valid ini diambil dari seluruh item nilai r hitung yang lebih besar dari t tabel 0,30, sedangkan pengujian reliabel cronbach's alpha sebesar 0,927. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai alpha 0,60 masih lebih besar nilai *cronbach's alpha* nya, dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) adalah Valid dan Reliabel.

4.2.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Indikator	Uji Validitas dan Reliabilitas				
	R hitung	Ket	Cronbach' Alpha	Standar	Keterangan
Y.1	0.495 (49.5%)				Valid dan Reliabel
Y.2	0.534 (53.4%)				Valid dan Reliabel
Y.3	0.364 (36.4%)				Valid dan Reliabel
Y.4	0.722 (72.2%)				Valid dan Reliabel
Y.5	0.388 (38.8%)				Valid dan Reliabel
Y.6	0.348 (34.8%)				Valid dan Reliabel
Y.7	0.380 (38.4%)				Valid dan Reliabel
Y.8	0.423 (42.3%)	Valid Jika $r >$	0.933	$> 0,60 =$ Reliabel	Valid dan Reliabel
Y.9	0.341 (34.1%)	0,30			Valid dan Reliabel
Y.10	0.325 (32.5%)				Valid dan Reliabel
Y.11	0.443 (44.3%)				Valid dan Reliabel
Y.12	0.343 (34.3%)				Valid dan Reliabel
Y.13	0.441 (44.1%)				Valid dan Reliabel
Y.14	0.365 (36.5%)				Valid dan Reliabel
Y.15	0.324 (32.4%)				Valid dan Reliabel

Sumber : Data olahan 2024

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.933	3

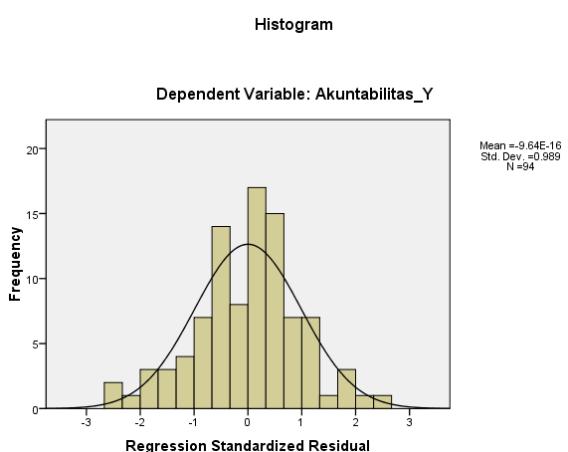
Berdasarkan hasil diatas, dari 15 item pernyataan yang dibuat dikatakan valid karena item nilai r hitung yang lebih besar dari t tabel 0,30 dengan *Cronbach' Alpha* sebesar 0,933 atau 93,3% > dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa hasil uji Validitas dan Reliabilitas variabel diatas adalah Valid dan Reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam statistik parametrik yang menggunakan analisis regresi memerlukan uji persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis hipotesis penelitian.

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-smirnov* (Ghozali,2009). hasil uji analisis grafik histogram dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Histogram uji normalitas data

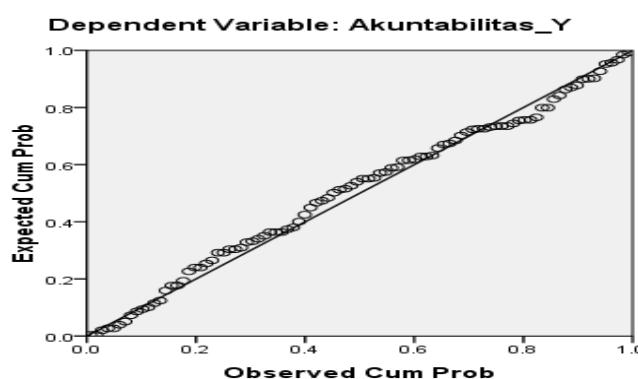
Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa pola gambar berupa kotak pengamatan tidak terlalu menceng kekiri ataupun kekanan, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi data tersebut normal. selanjutnya yaitu membuktikannya dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* dan uji *normal probability plot residual* seperti berikut ini:

Tabel 4. 13 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04921242
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.865
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* diatas, diketahui nilai signifikansi $0.865 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil ini sejalan dengan kurva normal P-P Plot dengan membandingkan data observasi distribusi yang mendekati normal, seperti dalam distribusi normal atau mengikuti pola garis diagonal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4. 3 Hasil uji normal probability plot residual

Gambar diatas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal dikarenakan terlihat garis observasi yang mendekati dan mengikuti arah garis diagonalnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance*, dan lawannya nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* lalu membandingkannya. Multikolinearitas terjadi apabila nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10.

Tabel 4. 14 Coefficients

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 Aksesibilitas_X1 SIA_X2	(Constant)	7.912	4.373		1.809	.074		
	Aksesibilitas_X1	.964	.087	.665	11.087	.000	.920	1.087
	SIA_X2	.635	.108	.353	5.893	.000	.920	1.087
a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y								

Sumber : Data olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel *coefficients* diatas, dapat di simpulkan pada tabel berikut:

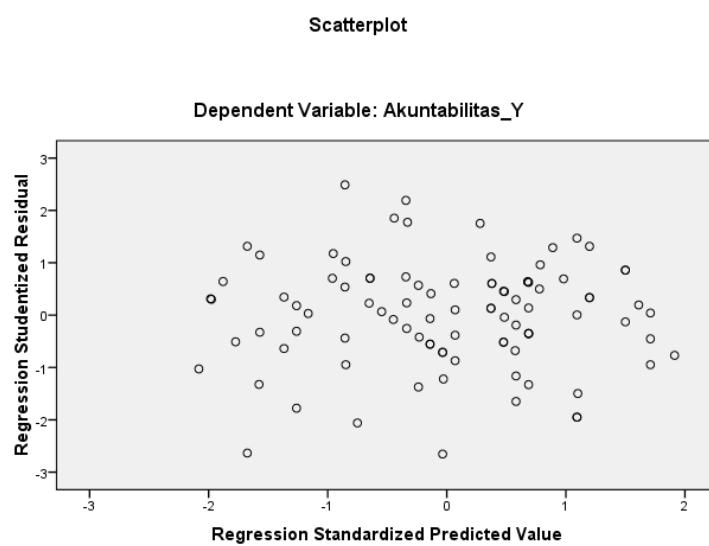
Tabel 4. 15 Hasil Simpulan Tabel Coefficients

Variabel	Tolerance	Nilai	VIF	Nilai
Aksesibilitas	0.920	> 0,10	1.087	< 10
Sistem Informasi Akuntansi	0.920	> 0,10	1.087	< 10

Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi telah lolos uji Multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* tidak ada yang dibawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang diatas 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).



Gambar 4. 4 Hasil uji heteroskedastisitas

Hasil uji asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot yang menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas (Homoskedastisitas), berdasarkan pada gambar diatas, terlihat titik-titik observasi tersebar hampir secara acak diatas dan dibawah titik nol pada sumbu Y.

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilakukan ketika syarat-syarat data penelitian telah terdistribusi secara normal yaitu melakukan uji asumsi klasik.

1. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai signifikan F dengan nilai alfa 0.05 (5%) yang akan diperoleh dari tabel Anova seperti dibawah ini:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	908.446	2	454.223	105.841	.000 ^a
	Residual	390.532	91	4.292		
	Total	1298.979	93			

a. Predictors: (Constant), SIA_X2, Aksesibilitas_X1
b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

Sumber : Data olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel Anova yang ditampilkan diatas menunjukkan nilai F tabel sebesar 105.841 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (0%). hasil tersebut menunjukkan bahwa secara statistik model tersebut adalah signifikan karena nilai sig 0% lebih kecil (<) dari nilai alfa (α) yaitu sebesar 5%. Hasil dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini “Aksesibilitas (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Diterima”.

2. Uji Ketepatan Model R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji ketepatan dari model regresi, yaitu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji ketepatan modal akan digunakan tabel Model *Summary* seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Uji Pengujian Ketepatan Model R2

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.836 ^a	.699	.693	2.072	1.227

a. Predictors: (Constant), SIA_X2, Aksesibilitas_X1
b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

Sumber : Data olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,699 atau 69.9%. nilai R^2 dapat dikatakan baik jika nilainya berada diatas 60% hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel independen secara simultan yaitu aksesibilitas dan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh sebesar 0,699 atau 69.9%, sedangkan sisanya sebesar 0,301 atau 93% ($100\% - 69.9\% = 30.1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

3. Uji Parsial (Uji T)

Hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai sig pada tabel *Coefficients* dengan nilai alfa yang ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%. jika nilai sig pada tabel *Coefficients* lebih kecil dari nilai alfa maka hipotesis diterima,

begitupula sebaliknya jika nilai sig lebih besar dari nilai alfa maka hipotesis ditolak. berikut hasil pengujian parsial:

Tabel 4. 18 Hasil uji parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 Aksesibilitas_X1	(Constant)	7.912	4.373		1.809	.074		
	Aksesibilitas_X1	.964	.087	.665	11.087	.000	.920	1.087
	SIA_X2	.635	.108	.353	5.893	.000	.920	1.087
a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y								

Sumber : Data olahan SPSS 16

Variabel Aksesibilitas (X1) berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,000 (0%) lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 5% sehingga variabel Aksesibilitas (X1) adalah signifikan (Nilai sig < dari nilai alfa 5%). kemudian *Coefficients* dalam penelitian ini dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* yaitu dengan arah positif sebesar 0,964 (96,4%). dengan demikian hipotesis yang diajukan “Aksesibilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Diterima”.

Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) pada tabel diatas menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 (0%) jika dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 5% masih lebih besar nilai sig sehingga variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) adalah signifikan (Nilai sig < dari nilai alfa 5%). selanjutnya dengan meihat arah *Coefficients* dalam penelitian ini dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* yaitu dengan arah positif sebesar 0,635 (63,5%) yang menunjukan

bahwa hipotesis yang diajukan “Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Diterima”. untuk menggambarkan bagaimana hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 19 Uji T

Hipotesis	Nilai Sig	Nilai Alfa	Ttl Pengaruh	Keputusan
X1,X2 Terhadap Y	0,000 (0%)	0,05 (5%)	0,699 (69.9%)	Diterima
X1 Terhadap Y	0,000 (0%)	0,05 (5%)	0,964 (96.4%)	Diterima
X2 Terhadap Y	0,000(0%)	0,05 (5%)	0,635 (63.5%)	Diterima
Variabel Lain	-	-	0,301 (30.1%)	

Sumber : Data olahan 2024

4.2.5 Persamaan Regresi Berganda

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Model regresi pada penelitian ini yaitu untuk dua prediktor seperti berikut;

$$Y = a + \beta_1.x_1 + \beta_2.x_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b1,b2 = Koefisien

X1 = Aksesibilitas

X2 = Sistem Informasi Akuntansi

ϵ = Eror Term

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis pengaruh variabel aksesibilitas (X1), dan sistem informasi akuntansi (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dapat di jelaskan dalam model persamaan berikut:

$$Y = 7.912 + 0,964X_1 + 0,635 X_2 + 0,301\epsilon$$

Berdasarkan model persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Angka konstan dari *Unstandardized Coefficients* yang ada pada penelitian ini yaitu sebesar 7.912 yang memiliki makna jika tidak ada penambahan variabel aksesibilitas (X1) dan sistem informasi akuntansi (X2), maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 7.912.
- 2) Variabel aksesibilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan arah koefisien positif sebesar 0,964 (96.4%). Nilai tersebut bermakna jika aksesibilitas lebih ditingkatkan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,964 (96.4%).
- 3) Variabel sistem informasi akuntansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan arah koefisien positif sebesar 63.5 %. Nilai tersebut bermakna jika sistem informasi akuntansi tinggi, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 63.5 %.

- 4) Nilai *error term* sebesar 30.1% menunjukkan besarnya pengaruh variabel lain diluar model yang turut mempengaruhi variabel utama akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Aksesibilitas dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diartikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Aksesibilitas (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)” Diterima. Pengaruh dapat menunjukkan bahwa peran variabel aksesibilitas dan sistem informasi akuntansi pada Badan Keuangan Kota Gorontalo perlu lebih ditingkatkan lagi secara maksimal untuk mencapai keakuntabelan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo telah memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Badan Keuangan Kota Gorontalo menyajikan laporan keuangan dengan baik dengan memberikan kemudahan akses serta keterbukaan bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah

memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Pemenuhan tata pemerintahan yang baik dimulai dengan pemantauan proses perencanaan, penganggaran dan implementasi dimana melibatkan masyarakat yang aktif. Pemberdayaan Sumber daya manusia, teknologi jaringan informasi, prosedur, perangkat keras dan lunak mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas relevan, dapat diandalkan, sebanding, dapat dipahami dan tetap diprioritaskan transparansi-keterbukaan dan akuntabilitas.

Kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penilaian ini yaitu sebesar 30,1%. beberapa variabel tersebut adalah sistem pengendalian intern, penyajian laporan keungan, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparat dan lain sebagainya. hasil kontribusi yang sangat rendah masing-masing variabel seperti aksesibilitas yang meskipun berpengaruh positif dan signifikan tetapi perlu ditingkatkan lagi karena arah koefisien sebesar 96,4%. sedangkan untuk variabel sistem informasi akuntansi yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh positif dan signifikan karena arah koefisien sebesar 63,5%.

4.3.2 Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil uji parsial (Uji T) menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis “Aksesibilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Diterima.

Pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimana laporan keuangan yang diproduksi oleh badan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi keuangan, masyarakat mempunyai akses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet sehingga aksesibilitas berpengaruh besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik aksesibilitas maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. badan keuangan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dikarenakan akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Menurut Mulyana (2006) akses yang diberikan dapat berupa media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Pemerintah berwenang memberikan kemudahan bagi para *stakeholders* dalam mengakses laporan keuangan untuk dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif. hasil ini didukung oleh teori *stewardship* yang mana pemerintah sebagai *steward* yang memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan sehingga publik

dapat melihat dan mengontrol pertanggungjawaban dalam penggunaan aset daerah serta kebijakan dalam menggunakan dana daerah sehingga dapat terciptanya keakuntabelan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeny Antika, Yunika dan Hafifah (2020) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang artinya semakin mudahnya akses terhadap laporan keuangan, maka semakin akuntabilitasnya pengelolaan keuangan daerah. berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Senda dan Paul (2021) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan informasi laporan keuangan daerah sulit untuk diakses pihak eksternal.

4.3.3 Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Sistem Informasi Akuntansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Diterima.

Pengetahuan tentang teknologi informasi sangat diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintah. Selain itu, pengetahuan tentang teknologi informasi merupakan modal terpenting yang mampu bersaing di era

globalisasi dan kemajuan di masa depan. Badan Keuangan Kota Gorontalo dikatakan telah memenuhi tata pemerintahan yang baik dikarenakan pemantauan proses perencanaan, penganggaran dan implementasi dimana melibatkan masyarakat yang aktif. Pemberdayaan SDM dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan SIA dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik. pemanfaatan teknologi juga mampu untuk membuat layanan semakin lebih mudah, cepat, praktis dan transparan.

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik dalam penyusunannya sehingga Badan Keuangan Kota Gorontalo mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas relevan, dapat diandalkan, sebanding, dapat dipahami dan tetap diprioritaskan transparansi-keterbukaan dan akuntabilitas. Sumber Daya Manusia dalam SIA memiliki peran krusial yaitu memastikan sistem berjalan efektif dan memberikan nilai tambah pada pengelolaan keuangan daerah.

Hasil tersebut mendukung teori stewardship di mana Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagai steward prinsip-prinsip akuntabilitas yang dimana sistem informasi akuntansi dibuat dan dirancang untuk memudahkan steward dalam mengelolah keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mudjiyono dan Yetti (2019) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh

positif dan signifikan karena apa yang telah tertuang dalam indikator variabel independen dapat dipenuhi dan ditaati dalam rangka penyajian laporan keuangan. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irham Subhan (2022) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik sebab pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sebesar 0.699 (69,9%) termasuk dalam kategori tinggi dan menunjukkan bahwa peran variabel aksesibilitas dan sistem informasi akuntansi perlu ditingkatkan lagi secara maksimal untuk mencapai keakuntabelan pengelolaan keuangan daerah.
2. Aksesibilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo. ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan lebih meningkat juga.
3. Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan kota Gorontalo. hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang hamper sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kinerja, dan efisiensi aparatur dalam menjalankan tugasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu melakukan pelatihan yang rutin agar pegawai memiliki pemahaman tentang sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang sama, memperluas subjek dan objek penelitian untuk menemukan hasil yang maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta menambahkan variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2023, Mei 2). *Pengelolaan Keuangan Lebih Transparan, Pemkot Gorontalo Manfaatkan Digitalisasi Permudah Transaksi*. Retrieved from [https://berita.gorontalokota.go.id:](https://berita.gorontalokota.go.id/)
<https://berita.gorontalokota.go.id/post/pengelolaan-keuangan-lebih-transparan-pemkot-gorontalo-manfaatkan-digitalisasi-permudah-transaksi>
- Afni, N. C. (2022). Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Peralihan. *Jurnal AKUA*, 186-194.
- Dea Priscilla, T. A. (2022). The Effect Of Implementation Of Finacial Accounting System, Financial Report. *BILANCIA*, 180-190.
- Deddy, N. L. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . *HITA* , 188-218.
- Dr. Baldric Siregar, M. C. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dr. Krismiaji, M. A. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fadil, M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian. *Jom Fekon*, 1-65.
- Fauziyah, M. R. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1-16.
- Firdaus, W. S. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan . *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1357-1368.
- Gorontalo, P. K. (2022, Maret). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021*. Retrieved Desember 05, 2023, from berita.gorontalokota.go.id:
<https://berita.gorontalokota.go.id>
- Irham, S. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Sebagai Vaeriabel Moderating. 1-38.

- Lily. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jom Fekon*, 1-15.
- Mardhani Susilawati, A. M. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *E-JRA*, 13-21.
- MINI. (2021). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *JOM FEKON*, 1-15.
- Nispa Sari, R. A. (2023). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan . *SEIKO*, 860-872.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (<https://peraturan.go.id/files/bn1781-2020.pdf>
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kota Gorontalo (<https://peraturan.bpk.go.id>)
- Prof. Dr. Abdul Halim, M. A. (2007). *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Pihak Unisan,2017, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,Universitas Ichsan Gorontalo. Gorontalo.
- Prof.Dr.Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Sarah Suenita Molle, H. A. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JIMT*, 348-356.
- Siska Wahyuni, N. I. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern,Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Ekonomi*, 98-110.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, Cv.

- Sumiyati. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jom FEKON*, 1-15.
- Usmany, S. Y. (2021). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Akuntansi*, 119-130.
- Zeny Antika, Y. M. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Wahana Akuntansi*, 213-232.

LAMPIRAN

KUESIONER

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
di-

Tempat

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradilla
NIM : E1120022
Program Studi/Fakultas : S1 Akuntansi/Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul “Pengaruh Aksesibilitas dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya digunakan untuk keperluan skripsi dan tidak untuk di publikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga. Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian

Cara pengisian kuesioner ini yaitu dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda centang/ tanda Checklist (✓) pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu : SS, S, N, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Netral (N)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

Identitas Responden

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Pendidikan Terakhir : _____

Aksesibilitas

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan keuangan.					
2	Laporan keuangan disajikan secara lengkap untuk umum.					
3	Laporan keuangan disajikan secara terbuka untuk umum.					
4	Laporan keuangan mudah untuk diakses.					
5	Keterbukaan dapat meminimalisir potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan.					
6	Laporan keuangan mudah untuk dipahami					

7	Laporan keuangan mencakup semua informasi yang dibutuhkan.				
8	Mempunyai sistem informasi daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak berkepentingan misalnya melalui portal dan situs web resmi.				

Sistem Informasi Akuntansi

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menunjang kemampuan dalam mengelola laporan keuangan.					
2	Memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas.					
3	Manfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam mengirim informasi.					
4	Menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi.					
5	Bekerja sesuai dengan pedoman mengenai pengelolaan keuangan.					
6	Laporan keuangan yang disajikan dan dihasilkan dari sistem informasi yang benar.					
7	Menggunakan perangkat lunak untuk mengelolah data seperti SIPD dan FMIS					
8	Proses pengelolaan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
9.	Pengelolaan keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan.					

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Dilakukannya <i>Financial Audit</i> terhadap laporan keuangan.					
2	Laporan keuangan yang disusun dapat dijadikan tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan pada tahun selanjutnya.					
3	Memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan					

4	Memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan				
5	Memahami pentingnya kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab				
6	Memiliki kewajiban untuk bertindak jujur dalam setiap aspek pekerjaan				
7	Memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku				
8	Selalu berusaha untuk mematuhi semua hukum dan peraturan terkait pekerjaan				
9	Melaporkan pelanggaran hukum/etika yang di saksikan				
10	Memiliki tanggung jawab untuk melindungi integritas kejujuran dan hukum dalam organisasi				
11	Secara konsisten mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam menjalankan suatu kegiatan				
12	Melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan				
13	Menyimpan proses dokumentasi dengan baik untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban				
14	Mengetahui kebijakan-kebijakan yang berlaku di organisasi				
15	Memiliki tanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan				

TABEL TABULASI DATA
X1

NO RESP	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	TOTAL	ganjil	genap
1	4	4	4	4	5	5	5	4	35	18	17
2	4	4	4	5	4	4	4	4	33	17	16
3	4	4	4	5	5	4	4	4	34	17	17
4	4	5	5	4	4	5	4	5	36	18	18
5	4	4	5	4	5	5	4	4	35	18	17
6	4	4	4	4	5	5	4	4	35	18	17
7	4	4	4	4	4	4	5	5	34	17	17
8	5	4	5	5	4	5	4	5	37	19	18
9	5	4	4	4	5	4	5	5	36	18	18
10	4	4	5	5	4	4	4	4	34	17	17
11	4	4	4	5	5	4	4	4	34	17	17
12	5	4	4	4	4	4	4	5	35	18	17
13	4	5	4	4	5	4	4	5	35	18	17
14	5	5	5	4	5	5	5	5	39	20	19
15	3	5	5	4	4	4	4	4	34	17	17
16	5	4	4	4	4	4	4	4	33	17	16
17	4	4	5	4	5	4	4	4	34	17	17
18	4	4	4	4	4	4	4	5	33	17	16
19	4	4	4	5	5	5	4	4	35	18	17
20	5	5	5	4	4	4	4	4	36	18	18
21	4	4	4	5	4	4	5	4	34	17	17
22	4	5	5	4	4	4	4	5	35	18	17
23	3	5	5	4	3	4	4	4	33	17	16
24	4	4	4	4	5	5	5	5	36	18	18
25	4	4	4	4	5	5	5	5	36	18	18
26	4	4	4	4	5	4	4	5	34	17	17
27	5	5	4	4	4	4	4	4	35	18	17
28	4	4	4	3	5	3	4	4	31	16	15
29	3	4	4	4	3	4	4	4	30	15	15
30	4	4	5	5	5	5	5	5	38	19	19
31	4	4	4	4	5	5	5	5	36	18	18
32	4	4	4	4	3	3	3	4	30	15	15
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32	16	16
34	5	5	4	4	4	4	4	5	35	18	17
35	4	4	5	5	5	5	5	5	38	19	19
36	4	4	4	4	5	5	5	5	36	18	18
37	4	4	4	5	4	5	4	4	34	17	17
38	4	4	5	5	4	4	5	5	36	18	18
39	4	4	4	4	4	5	4	4	33	17	16
40	5	5	4	5	4	5	4	5	37	18	17
41	4	4	5	5	4	5	4	5	36	18	18
42	3	4	4	4	4	5	4	4	32	16	16
43	5	5	5	4	4	4	4	4	36	18	18
44	4	4	4	4	4	5	5	5	35	18	17
45	4	4	4	4	4	5	4	4	33	17	16
46	4	4	4	4	3	4	4	4	31	16	15
47	4	5	4	5	4	5	4	5	36	18	18
48	5	5	4	5	4	4	4	5	37	19	18
49	4	4	4	4	2	4	4	5	31	16	15
50	5	5	4	5	5	4	4	4	37	19	18
51	4	4	4	4	5	3	4	4	32	16	16
52	4	4	3	5	4	4	4	4	32	16	16
53	4	4	4	5	4	3	5	3	32	16	16
54	4	4	4	4	4	5	5	5	35	18	17
55	4	4	4	4	3	4	4	4	31	16	15
56	4	4	3	4	5	5	4	4	33	17	16
57	4	4	4	4	4	5	4	4	33	17	16
58	5	5	4	5	5	5	4	5	38	19	19
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32	16	16
60	4	4	4	4	4	4	4	5	33	17	16
61	5	4	4	4	4	4	4	4	33	17	16
62	5	4	4	4	5	4	4	4	34	17	17
63	5	4	4	4	3	4	4	4	32	16	16
64	4	4	4	4	3	4	4	4	31	16	15
65	5	5	5	4	5	5	5	5	39	20	19
66	4	5	5	4	3	4	4	4	33	17	16
67	4	4	4	4	4	4	4	5	33	17	16
68	4	5	5	4	4	4	4	5	35	18	17
69	4	5	4	4	4	4	5	5	35	18	17
70	4	4	5	4	4	4	4	4	33	17	16
71	5	4	4	4	5	4	4	5	35	18	17
72	5	4	4	4	5	4	5	4	35	18	17
73	4	4	4	5	4	5	4	5	35	18	17
74	5	4	4	4	5	5	5	5	37	19	18
75	5	4	4	4	5	5	5	4	36	18	18
76	5	4	4	4	5	4	4	5	35	18	17
77	4	4	4	3	4	5	4	4	32	16	16
78	5	4	4	4	4	5	4	5	35	18	17
79	4	4	5	4	4	4	4	4	33	17	16
80	5	5	4	4	4	4	4	5	35	18	17
81	4	4	4	4	4	5	4	4	33	17	16
82	4	4	4	4	4	5	4	5	34	17	17
83	5	5	5	4	5	4	4	4	37	19	18
84	4	5	5	5	4	5	4	5	38	19	19
85	5	5	4	5	5	4	4	4	36	18	18
86	4	5	4	5	4	5	4	5	36	18	18
87	5	5	4	5	4	5	4	4	36	18	18
88	5	5	4	5	4	4	4	5	36	18	18
89	5	5	4	4	4	5	4	4	35	18	17
90	5	5	5	4	4	4	4	4	36	18	18
91	5	4	4	4	4	5	5	4	35	18	17
92	5	4	5	4	5	4	5	5	37	19	18
93	5	4	4	4	5	4	4	4	34	18	18
94	5	4	4	5	5	4	4	4	35	18	17

X2

NO RESP	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	TOTAL	Ganjil	Genap
1	5	4	4	5	4	4	4	5	4	39	20	19
2	3	3	3	4	3	4	3	4	4	31	16	15
3	4	4	3	4	5	4	4	5	4	37	19	18
4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	40	20	20
5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	39	20	19
6	5	4	4	5	5	5	5	5	5	43	22	21
7	5	4	4	5	4	5	4	5	4	40	20	20
8	4	5	5	5	5	4	5	4	5	42	21	21
9	4	5	5	4	4	5	5	5	5	42	21	21
10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	18	17
11	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34	17	17
12	5	4	3	4	4	3	4	4	4	35	18	17
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	18	17
14	5	4	5	5	4	5	5	5	5	43	22	21
15	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	19	18
16	5	4	5	5	5	5	4	5	5	43	22	21
17	4	4	3	4	4	4	5	3	4	35	18	17
18	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44	22	22
19	4	4	4	5	4	5	4	4	5	39	20	19
20	4	4	4	5	5	4	5	5	5	41	21	20
21	4	4	4	4	5	5	4	4	5	39	20	19
22	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	19	18
23	3	5	5	4	4	4	4	4	4	37	19	18
24	5	4	4	4	4	5	4	5	5	40	20	20
25	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38	19	19
26	4	4	4	5	5	4	5	4	4	39	20	19
27	4	5	4	5	5	5	5	5	4	42	21	21
28	4	4	3	4	4	4	3	3	3	32	16	16
29	4	4	4	5	4	5	4	5	5	40	20	20
30	4	4	5	4	4	4	5	4	5	39	20	19
31	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39	20	19
32	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34	17	17
33	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	19	18
34	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38	19	19
35	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38	19	19
36	5	4	4	4	5	4	5	5	5	41	21	20
37	4	5	5	4	5	5	4	4	4	40	20	20
38	4	4	4	3	4	4	5	4	4	36	18	18
39	5	4	5	4	5	4	4	4	5	40	20	20
40	4	5	4	5	5	5	4	5	5	42	21	21
41	5	5	4	5	4	4	5	4	5	41	21	20
42	4	4	4	5	4	4	3	4	4	36	18	18
43	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40	20	20
44	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34	17	17
45	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35	18	17
46	4	4	4	5	4	4	3	4	4	36	18	18
47	5	4	5	4	5	4	4	4	5	40	20	20
48	5	4	4	5	5	5	4	4	5	41	21	20
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	18	18
50	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34	17	17
51	4	3	4	3	4	3	3	4	3	31	16	15
52	4	4	3	4	3	4	4	3	3	32	16	16
53	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34	17	17
54	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35	18	17
55	5	4	4	4	5	4	4	5	4	39	20	19
56	4	5	4	5	4	4	4	5	4	39	20	19
57	4	4	4	5	5	4	5	4	5	40	20	20
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	23	22
59	3	5	5	5	4	4	5	5	5	41	21	20
60	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38	19	19
61	5	4	5	4	5	4	5	4	5	41	21	20
62	4	4	5	5	5	5	5	4	5	42	21	21
63	3	4	4	5	5	5	4	4	5	39	20	19
64	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37	19	18
65	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38	19	19
66	5	5	5	4	5	5	4	4	5	42	21	21
67	4	4	5	5	4	4	4	4	5	39	20	19
68	3	4	5	5	4	4	4	4	5	38	19	19
69	5	4	4	4	5	4	5	4	5	40	20	20
70	4	5	5	5	4	4	4	4	4	40	20	20
71	3	5	4	3	3	4	4	5	4	35	18	17
72	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34	17	17
73	5	4	5	5	4	4	5	5	5	42	21	21
74	4	4	5	5	5	4	5	5	5	42	21	21
75	5	5	4	4	4	5	5	4	5	41	21	20
76	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44	22	22
77	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44	22	22
78	5	5	4	5	5	4	5	5	4	42	21	21
79	5	5	4	5	4	5	4	5	5	42	21	21
80	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40	20	20
81	4	5	4	4	5	4	4	5	4	39	20	19
82	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38	19	19
83	5	4	5	4	5	4	4	4	5	40	20	20
84	4	4	5	5	4	4	4	5	4	39	20	19
85	3	5	4	4	3	5	4	5	4	37	19	18
86	4	4	5	4	4	4	4	4	5	38	19	19
87	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	18	17
88	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	19	18
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	18	18
90	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42	21	21
91	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34	17	17
92	5	5	4	4	4	3	4	4	3	36	18	18
93	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	18	17
94	5	5	4	3	3	4	5	4	5	38	19	19

Y

NO RESP	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15	TOTAL	GANJIL	GENAP
1	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	71	36	35
2	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	68	34	34	
3	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	72	36	36	
4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	67	34	33	
5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	64	32	32	
6	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	31	30	
7	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	65	33	32	
8	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	64	32	32	
9	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	66	33	33	
10	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	69	35	34	
11	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	70	35	35	
12	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	68	34	34	
13	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	68	34	34	
14	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	66	33	33	
15	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	65	33	32	
16	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	65	33	32	
17	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	70	35	35	
18	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	65	33	32	
19	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	68	34	34	
20	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	67	34	33	
21	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	68	34	34	
22	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	69	35	34	
23	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	64	32	32	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	64	32	32	
25	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	69	35	34	
26	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	66	33	33	
27	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	66	33	33	
28	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	69	35	34
29	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	32	31	
30	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	70	35	35	
31	5	3	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	68	34	34
32	5	3	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	68	34	34	
33	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	62	31	31	
34	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	64	32	32	
35	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	69	35	34
36	4	3	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	67	34	33	
37	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	66	33	33	
38	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	67	34	33	
39	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	62	31	31	
40	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	65	33	32	
41	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	62	31	31	
42	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	64	32	32	
43	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	66	33	33	
44	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	69	35	34	
45	5	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	69	35	34	
46	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	32	31	
47	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	63	32	31	
48	4	3	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	65	33	32	
49	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	61	31	30	
50	4	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71	36	35	
51	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	65	33	32	
52	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	68	34	34	
53	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	65	33	32	
54	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	68	34	34	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	30	30	
56	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	66	33	33	
57	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	61	31	30	
58	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	65	33	32	
59	3	3	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	64	32	32	
60	3	3	5	3	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	60	30	30	
61	3	3	4	3	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	59	30	29	
62	3	3	4	3	4	5	5	5	3	4	4	4	4	5	62	31	31	
63	3	3	5	3	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	62	31	31	
64	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	60	30	30	
65	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	70	35	35	
66	3	3	4	3	4	5	4	3	4	4	5	5	5	4	60	30	30	
67	5	4	4	4	5	5	4	3	5	4	4	5	4	4	64	32	32	
68	3	3	5	3	5	4	4	5	5	3	4	4	5	5	64	32	32	
69	5	3	4	3	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	67	34	33	
70	4	3	4	3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	67	34	33	
71	3	5	3	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	65	33	32	
72	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	72	36	36	
73	4	3	4	3	3	5	4	3	4	4	3	4	4	4	55	28	27	
74	3	3	5	3	4	3	4	4	5	5	4	4	3	5	60	30	30	
75	3	3	4	3	3	5	3	5	4	4	5	4	3	5	59	30	29	
76	3	3	4	3	3	5	4	3	5	5	3	4	3	5	58	29	29	
77	5	3	5	3	3	5	3	4	3	4	3	5	3	4	57	29	28	
78	4	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	64	32	32	
79	4	3	4	3	5	3	5	3	5	3	4	3	5	5	58	29	29	
80	4	3	3	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	64	32	32	
81	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	64	32	32	
82	5	3	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	67	34	33	
83	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	70	35	35	
84	4	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	65	33	32	
85	4	3	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	66	33	33	
86	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	72	36	36	
87	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	70	35	35	
88	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	70	35	35	
89	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	69	35	34	
90	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	67	34	33	
91	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	72	36	36	
92	4	5	5</td															

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.176	.254*	.113	.227*	.295**	.099	.197	.499**
	Sig. (2-tailed)		.090	.013	.279	.028	.004	.340	.057	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.2	Pearson Correlation	.176	1	.390**	.549**	.146	.200	.256*	.211*	.601**
	Sig. (2-tailed)	.090		.000	.000	.160	.053	.013	.041	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.3	Pearson Correlation	.254*	.390**	1	.284**	.245*	.377**	.254*	.275**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.013	.000		.005	.017	.000	.014	.007	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.4	Pearson Correlation	.113	.549**	.284**	1	.085	.252*	.343**	.196	.582**
	Sig. (2-tailed)	.279	.000	.005		.416	.014	.001	.058	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.5	Pearson Correlation	.227*	.146	.245*	.085	1	.317**	.334**	.316**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.028	.160	.017	.416		.002	.001	.002	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.6	Pearson Correlation	.295**	.200	.377**	.252*	.317**	1	.337**	.285**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.004	.053	.000	.014	.002		.001	.005	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.7	Pearson Correlation	.099	.256*	.254*	.343**	.334**	.337**	1	.155	.569**
	Sig. (2-tailed)	.340	.013	.014	.001	.001	.001		.136	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.8	Pearson Correlation	.197	.211*	.275**	.196	.316**	.285**	.155	1	.579**
	Sig. (2-tailed)	.057	.041	.007	.058	.002	.005	.136		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
TOTAL	Pearson Correlation	.499**	.601**	.662**	.582**	.582**	.648**	.569**	.579**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.176	.254*	.113	.227*	.295**	.099	.197	.499**
	Sig. (2-tailed)		.090	.013	.279	.028	.004	.340	.057	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.2	Pearson Correlation	.176	1	.390**	.549**	.146	.200	.256*	.211*	.601**
	Sig. (2-tailed)	.090		.000	.000	.160	.053	.013	.041	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.3	Pearson Correlation	.254*	.390**	1	.284**	.245*	.377**	.254*	.275**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.013	.000		.005	.017	.000	.014	.007	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.4	Pearson Correlation	.113	.549**	.284**	1	.085	.252*	.343**	.196	.582**
	Sig. (2-tailed)	.279	.000	.005		.416	.014	.001	.058	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.5	Pearson Correlation	.227*	.146	.245*	.085	1	.317**	.334**	.316**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.028	.160	.017	.416		.002	.001	.002	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.6	Pearson Correlation	.295**	.200	.377**	.252*	.317**	1	.337**	.285**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.004	.053	.000	.014	.002		.001	.005	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.7	Pearson Correlation	.099	.256*	.254*	.343**	.334**	.337**	1	.155	.569**
	Sig. (2-tailed)	.340	.013	.014	.001	.001	.001		.136	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.8	Pearson Correlation	.197	.211*	.275**	.196	.316**	.285**	.155	1	.579**
	Sig. (2-tailed)	.057	.041	.007	.058	.002	.005	.136		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
TOTAL	Pearson Correlation	.499**	.601**	.662**	.582**	.582**	.648**	.569**	.579**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	3

X2**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.042	.157	-.049	-.022	.059	.256*	.225*	-.013	.372**
	Sig. (2-tailed)		.690	.131	.638	.830	.572	.013	.029	.903	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.2	Pearson Correlation	.042	1	.136	.142	.167	.173	.229*	.315**	.211*	.559**
	Sig. (2-tailed)	.690		.190	.172	.109	.095	.026	.002	.041	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.3	Pearson Correlation	.157	.136	1	.044	.354**	.170	.269**	.237*	.388**	.608**
	Sig. (2-tailed)	.131	.190		.676	.000	.101	.009	.022	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.4	Pearson Correlation	-.049	.142	.044	1	.038	.187	-.004	.119	.129	.374**
	Sig. (2-tailed)	.638	.172	.676		.718	.071	.969	.252	.217	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.5	Pearson Correlation	-.022	.167	.354**	.038	1	-.075	.192	.114	.331**	.460**
	Sig. (2-tailed)	.830	.109	.000	.718		.473	.063	.274	.001	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.6	Pearson Correlation	.059	.173	.170	.187	-.075	1	.062	.221*	.212*	.444**
	Sig. (2-tailed)	.572	.095	.101	.071	.473		.552	.032	.040	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.7	Pearson Correlation	.256*	.229*	.269**	-.004	.192	.062	1	.132	.237*	.528**
	Sig. (2-tailed)	.013	.026	.009	.969	.063	.552		.203	.021	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2.8	Pearson Correlation	.225*	.315**	.237*	.119	.114	.221*	.132	1	.055	.541**

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	3

Y

Correlations

Y.4	Pearson Correlation	.598**	.506*	.293*	1	.318*	.203	.175	.202	.196	.077	.255*	.080	.232*	.052	.035	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004		.002	.050	.091	.051	.059	.459	.013	.442	.024	.618	.734	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.5	Pearson Correlation	.121	.185	.223*	.318**	1	.036	.172	.060	.094	.036	.029	.051	.343**	.051	.036	.388**
	Sig. (2-tailed)	.246	.075	.031	.002		.734	.097	.565	.368	.733	.782	.622	.001	.622	.733	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.6	Pearson Correlation	.155	.215*	.139	.203*	.036	1	.022	.126	.184	.047	.039	.156	.011	.033	.013	.348**
	Sig. (2-tailed)	.136	.037	.182	.050	.734		.835	.226	.076	.653	.710	.134	.917	.752	.904	.001
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.7	Pearson Correlation	.222*	.099	.092	.175	.172	.022	1	.489**	.028	.166	.148	.054	.031	.014	.027	.380**
	Sig. (2-tailed)	.031	.344	.379	.091	.097	.835		.000	.785	.110	.155	.605	.768	.891	.795	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.8	Pearson Correlation	.005	.036	.114	.202	.060	.126	.489**	1	.151	.144	.332**	.022	.174	.012	.084	.423**
	Sig. (2-tailed)	.965	.728	.273	.051	.565	.226	.000		.147	.165	.001	.833	.093	.905	.421	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.9	Pearson Correlation	.160	.079	.095	.196	.094	.184	.028	.151	1	.336**	.035	.062	.034	.118	.012	.341**
	Sig. (2-tailed)	.125	.448	.363	.059	.368	.076	.785	.147		.001	.739	.552	.747	.257	.909	.001
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.10	Pearson Correlation	-.057	.033	.120	.077	.036	.047	.166	.144	.336**	1	.038	.087	.076	.323**	.191	.325**
	Sig. (2-tailed)	.587	.755	.248	.459	.733	.653	.110	.165	.001		.719	.402	.469	.001	.066	.001
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.11	Pearson Correlation	.148	.140	-.142	.255*	.029	.039	.148	.332**	.035	.038	1	.281**	.339**	.015	.012	.443**
	Sig. (2-tailed)	.155	.178	.173	.013	.782	.710	.155	.001	.739	.719		.006	.001	.887	.905	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y.12	Pearson Correlation	.107	.076	.174	.080	.051	.156	.054	.022	.062	.087	-.281**	1	.316**	.131	.121	.343**

	Sig. (2-tailed)	.303	.465	.094	.442	.622	.134	.605	.833	.552	.402	.006	.002	.207	.244	.001			
N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94			
Y.13	Pearson Correlation	-	.059	.087	.059	.232	.343*	.011	.031	.174	.034	.076	.339**	.316**	1	.086	.116	.441**	
	Sig. (2-tailed)	.572	.406	.571	.024	.001	.917	.768	.093	.747	.469	.001	.002	.410	.265	.000			
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
Y.14	Pearson Correlation	-	.016	.009	.174	.052	.051	.033	.014	.012	.118	.323**	.015	.131	.086	1	.613**	.365**	
	Sig. (2-tailed)	.878	.933	.094	.618	.622	.752	.891	.905	.257	.001	.887	.207	.410	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
Y.15	Pearson Correlation	-	.008	.068	.040	.035	.036	.013	.027	.084	.012	.191	.012	.121	.116	.613**	1	.324**	
	Sig. (2-tailed)	.938	.517	.702	.734	.733	.904	.795	.421	.909	.066	.905	.244	.265	.000	.000	.000	.001	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
TOTAL	Pearson Correlation	-	.495**	.534**	.364**	.722**	.388**	.348**	.380**	.423**	.341**	.325**	.443**	.343**	.441**	.365**	.324**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.001	.001	.000	.001	.000	.000	.000	.001		
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	3

ANALISIS REGRESI

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIA_X2, Aksesibilitas_X1 ^a		.Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.836 ^a	.699	.693	2.072	1.227

a. Predictors: (Constant), SIA_X2, Aksesibilitas_X1

b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	908.446	2	454.223	105.841	.000 ^a
	Residual	390.532	91	4.292		
	Total	1298.979	93			

a. Predictors: (Constant), SIA_X2, Aksesibilitas_X1

b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.912	4.373		1.809	.074		
Aksesibilitas_X1	.964	.087		.665	11.087	.000	.920 1.087
SIA_X2	.635	.108		.353	5.893	.000	.920 1.087

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Aksesibilitas_X1	SIA_X2
1	1	2.995	1.000	.00	.00	.00

2	.003	29.684	.08	.98	.17
3	.001	45.743	.92	.02	.83

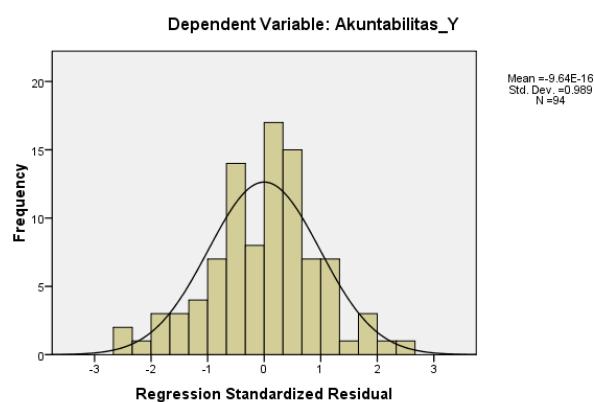
a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

Residuals Statistics^a

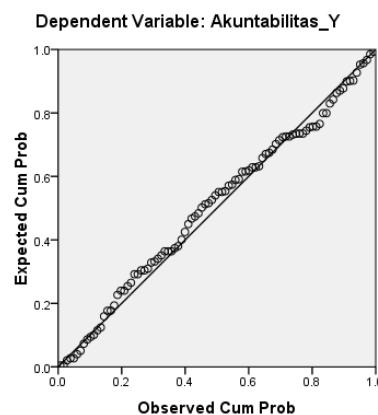
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	59.07	71.55	65.57	3.125	94
Std. Predicted Value	-2.082	1.913	.000	1.000	94
Standard Error of Predicted Value	.220	.703	.357	.096	94
Adjusted Predicted Value	59.20	71.64	65.57	3.123	94
Residual	-5.464	5.099	.000	2.049	94
Std. Residual	-2.637	2.462	.000	.989	94
Stud. Residual	-2.654	2.488	.001	1.005	94
Deleted Residual	-5.585	5.210	.004	2.116	94
Stud. Deleted Residual	-2.748	2.563	.000	1.018	94
Mahal. Distance	.057	9.717	1.979	1.714	94
Cook's Distance	.000	.136	.011	.020	94
Centered Leverage Value	.001	.104	.021	.018	94

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Y

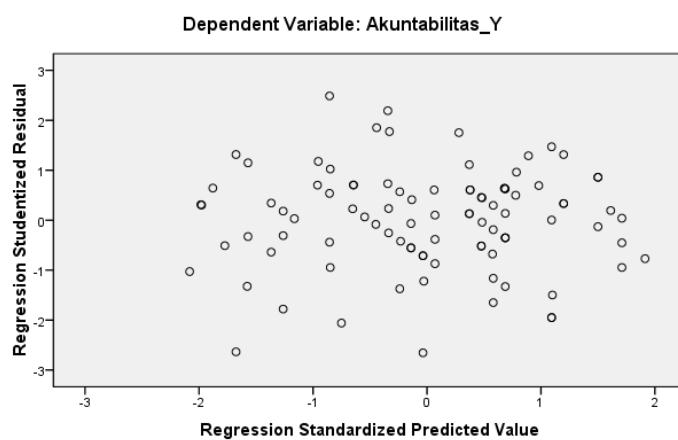
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04921242
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.865
a. Test distribution is Normal.		

CURRICULUM VITAE



FARADILLA

Saya merupakan mahasiswi akuntansi yang antusias, analisis tinggi, teliti, bertanggung jawab, dapat dipercaya, senang belajar hal baru dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. terampil dalam mengoperasikan microsoft office. senang mencari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan saya dalam segala bidang terutama dalam bidang keuangan.

Gorontalo, Indonesia 96113 | 0822-5348-2808 | faradillanasir10@gmail.com

PENDIDIKAN

Universitas Ichsan Gorontalo	(Agustus 2020-Juni 2024)
Jurusan Akuntansi	3.91

Sma Negeri 3 Enrekang	(Juli 2017-Mei 2020)
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS)	

- Menjadi siswa top 10 dengan nilai terbaik selama dikelas 10-12
 - Menjadi top 25 dengan nilai terbaik diseluruh angkatan jurusan ips
 - Mata pelajaran paling relavan: Akuntansi keuangan
-

PENGALAMAN

Asisten Toko Anugrah Abadi dan toko baju

- Memberikan pelayanan maksimal > 10 orang pembeli di toko setiap hari demi menjamin kepuasan pelanggan.
- Bertanggung jawab dalam mengorganisir letak penyimpanan produk toko demi menciptakan visual yang baik.
- Bertanggung jawab dalam menuliskan nota pembelian konsumen.

Namira Bakery

- Bertanggung jawab dalam menyelesaikan >2kg pesanan kue kering dalam sehari sesuai kustomisasi pelanggan.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Bertanggung jawab besar dalam menyelesaikan tugas dari atasan berupa penginputan pekerjaan tangible ODP menggunakan system Proactive Maintenance.
 - Bertanggung jawab melakukan pengecekan profile bandwidth pelanggan indihome dengan menggunakan system Acs.
-

HARD SKILL

- Memahami alur dan konsep pembuatan laporan keuangan.
- Mampu mengoperasikan Microsoft office

SOFT SKILL

- Dapat bekerja dalam sebuah tim kerja
- Mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi yang baik.
- Bertanggung jawab,dapat dipercaya,kreatif dan inovatif



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4648/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Faradilla

NIM : E1120022

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : PENGARUH AKSESIBILITAS DAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS
PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO BADAN KEUANGAN

Jln. Nani Wartabone No.06 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/ B.KEU/623 /2024

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARADILLA

N I M : E1120022

Jurusan : S1 Akuntansi

Adalah benar-benar telah mengadakan penelitian dan memperoleh data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, berupa Sejarah Singkat Berdirinya Badan keuangan, Visi Misi, bagan, Struktur Organisasi, digunakan untuk kelengkapan Penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Aksebilitas dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Studi Empris Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)”. Adapun data yang diberikan benar-benar real dalam kegiatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 26 Februari 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA GORONTALO**

NURYANTO, Ak M.Ec.Dev.CA

Pembina Utama Muda

Nip. 19680706 198903 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 016/SRP/FE-UNISAN/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Faradilla
NIM : E1120022
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Aksesibilitas Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 13%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Universitas Ichsan Gorontalo
Mengetahui
Dekan,
DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 20 Maret 2024
Tim Verifikasi,


Nurhasmi, S.KM

PAPER NAME

SKRIPSI Faradilla (E1120022).docx

AUTHOR

Faradilla Faradilla

WORD COUNT

24381 Words

CHARACTER COUNT

147666 Characters

PAGE COUNT

147 Pages

FILE SIZE

1.0MB

SUBMISSION DATE

Mar 20, 2024 12:25 PM GMT+8

REPORT DATE

Mar 20, 2024 12:28 PM GMT+8

● 13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 13% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 13% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	peraturan.bpk.go.id	Internet	3%
2	repository.umsu.ac.id	Internet	1%
3	eprints.umpo.ac.id	Internet	1%
4	media.neliti.com	Internet	<1%
5	ejournal.stiesia.ac.id	Internet	<1%
6	ejurnal.undana.ac.id	Internet	<1%
7	journal.unj.ac.id	Internet	<1%
8	MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 2 Desember 2012", JURNAL R...	Crossref	<1%

9	scribd.com	<1%
	Internet	
10	ejournal.unhi.ac.id	<1%
	Internet	
11	rabiynet.blogspot.com	<1%
	Internet	
12	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
13	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
15	digilib.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.umpalopo.ac.id	<1%
	Internet	
17	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-20	<1%
	Submitted works	
18	id.123dok.com	<1%
	Internet	
19	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
20	Reza Cahya Anggraini, Saiful Anwar. "Pengaruh Sistem Pengelolaan Da... Crossref	<1%

- 21 eprints.iain-surakarta.ac.id <1%
Internet
- 22 repository.unhas.ac.id <1%
Internet
- 23 jurnal.risetilmiah.ac.id <1%
Internet
- 24 LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-28 <1%
Submitted works
- 25 repository.stienobel-indonesia.ac.id <1%
Internet
- 26 repository.unej.ac.id <1%
Internet
- 27 Fadillah Abdjul, James D.D Massie, Yunita Mandagie. "PENGARUH CO... <1%
Crossref
- 28 eprints.undip.ac.id <1%
Internet
- 29 epub.imandiri.id <1%
Internet
- 30 repository.ub.ac.id <1%
Internet
- 31 LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16 <1%
Submitted works